PEMERINTAH ACEH

LKj

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN KINERJA

2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada ALLAH Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Aceh tahun 2020 pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2017- 2022, dan merupakan instrumen input bagi penetapan kebijakan pada tahun berikutnya. Pengukuran pencapaian sasaran didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) sehingga diharapkan akan terlihat capaian dan efektivitas program kerja Badan Kesbangpol Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang dan dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2020, kami sampaikan terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya kita semua dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan.

Banda Aceh, Februari 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19691120 199103 1 014

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesbangpol Aceh tahun 2020, merupakan penjabaran hasil pelaksanaan rencana kerja tahunan sebagaiman tercantum dalam Renstra tahun 2017- 2022, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kesbangpol Aceh berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKJ yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKJ yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Badan Kesbangpol Aceh sebagai Instansi di lingkungan Pemerintah Aceh dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020. Laporan ini menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya, data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Aceh yang disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Aceh. Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesbangpol Aceh tahun 2020 mencapai persentase 90,42%.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Faktor penghambat realisasi capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah terjadinya wabah COVID-19 yang berimplikasi kepada *refocusing* anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Badan Kesbangpol Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
EXECUTIVE SUMMARY ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh 4
1.3.1. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh 4
1.3.2. Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya 15
1.4. Isu-isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan pada Organiasasi 21
1.4.1. Isu-isu Strategis 21
1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis pada Pelayanan Organisasi 23

BAB II : PERENCANAAN KINERJA **30**
2.1. Latar Belakang 30
2.1.1. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 30
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan 33

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020 34

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

2.3. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020 36

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 39

3.1. Capaian Kinerja pada Penetapan Kinerja 39

3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 41

3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi 43

3.4. Analisis Kinerja 45

3.4.1 Analisis Capaian Kinerja pada Penetapan Kinerja 45

3.4.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis I: Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan di dalam pembangunan daerah 45

3.4.1.2 Analisis Program Kegiatan Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah 47

3.4.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 56

3.4.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis II: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Perdamaian Aceh 57

3.4.1.5 Analisis Program Kegiatan Sasaran Strategis II: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Perdamaian Aceh 59

3.4.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 74

3.4.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis III: Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia 84

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4.1.8 Analisis Program Kegiatan Sasaran Strategis III: Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia 89

3.4.1.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 92

BAB IV : REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN 93

4.1. Realisasi Pendapatan 93

4.2. Realisasi Anggaran 93

BAB V : PENUTUP 97

5.1 Kesimpulan 97

5.2 Tindak Lanjut 98

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 16

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 17

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 18

Tabel 1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia 19

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Per Bidang 20

Tabel 1.6 Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah Penggunaan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 20

Tabel 1.7 Reklasifikasi Aset Tetap s.d. Tahun 2019 21

Tabel 1.8 Analisis Lingkungan Strategis 27

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran 32

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 33

Tabel 2.3 Sasaran Program Kegiatan RPJMA 2017-2022 35

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020 37

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020 40

Tabel 3.2 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 s/d 2020 41

Tabel 3.3 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja dengan Renstra 43

Tabel 3.4 Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan/ Perkumpulan yang Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2017-2020 45

Tabel 3.5 Pemberian Hibah Kepada Lembaga Tahun 2017-2020 di Provinsi Aceh 52

Tabel 3.6 Ormas Asing di Provinsi Aceh 54

Tabel 3.7 Analisis Tingkat Efisiensi Berdasarkan Anggaran 56

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel 3.8 Potensi Konflik yang Dilaporkan dan Tertangani Selama Tahun 2020 58

Tabel 3.9 Analisis Tingkat Efisiensi Berdasarkan Anggaran Sasaran Strategis II 74

Tabel 3.10 Sampel Potensi Konflik dan Capaian Penanganannya 75

Tabel 3.11 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aceh Tahun 2020 .. 84

Tabel 3.12 Daftar Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 88

Tabel 3.13 Analisis Tingkat Efisiensi Berdasarkan Anggaran Sasaran Strategis III 92

Tabel 4.1 Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan 94

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon 16

Grafik 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 17

Grafik 3.1 Perkembangan IDI Provinsi Aceh 85

Grafik 3.2 Perkembangan Grafik IDI Aspek Provinsi Tahun 2019-2020 86

Grafik 3.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh Tahun 2018-2019 87

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh 4

Gambar 3.1 Penyerahan Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Tim Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 39

Gambar 3.2 Peta Potensi Konflik yang Menonjol Tahun 2020 61

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (*Performance Accountability Report*) merupakan uraian lebihlanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahun anggaran program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) untuk tahun 2020 sebagai konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBA yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LKJ dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat di bidang politik pemerintahan, serta permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Pemerintah Aceh, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja adalah untuk mempertanggung jawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh selama tahun 2020, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

LKJ 2020
KESBANGPOL ACEH

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh.

1.3.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, terdiri dari :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

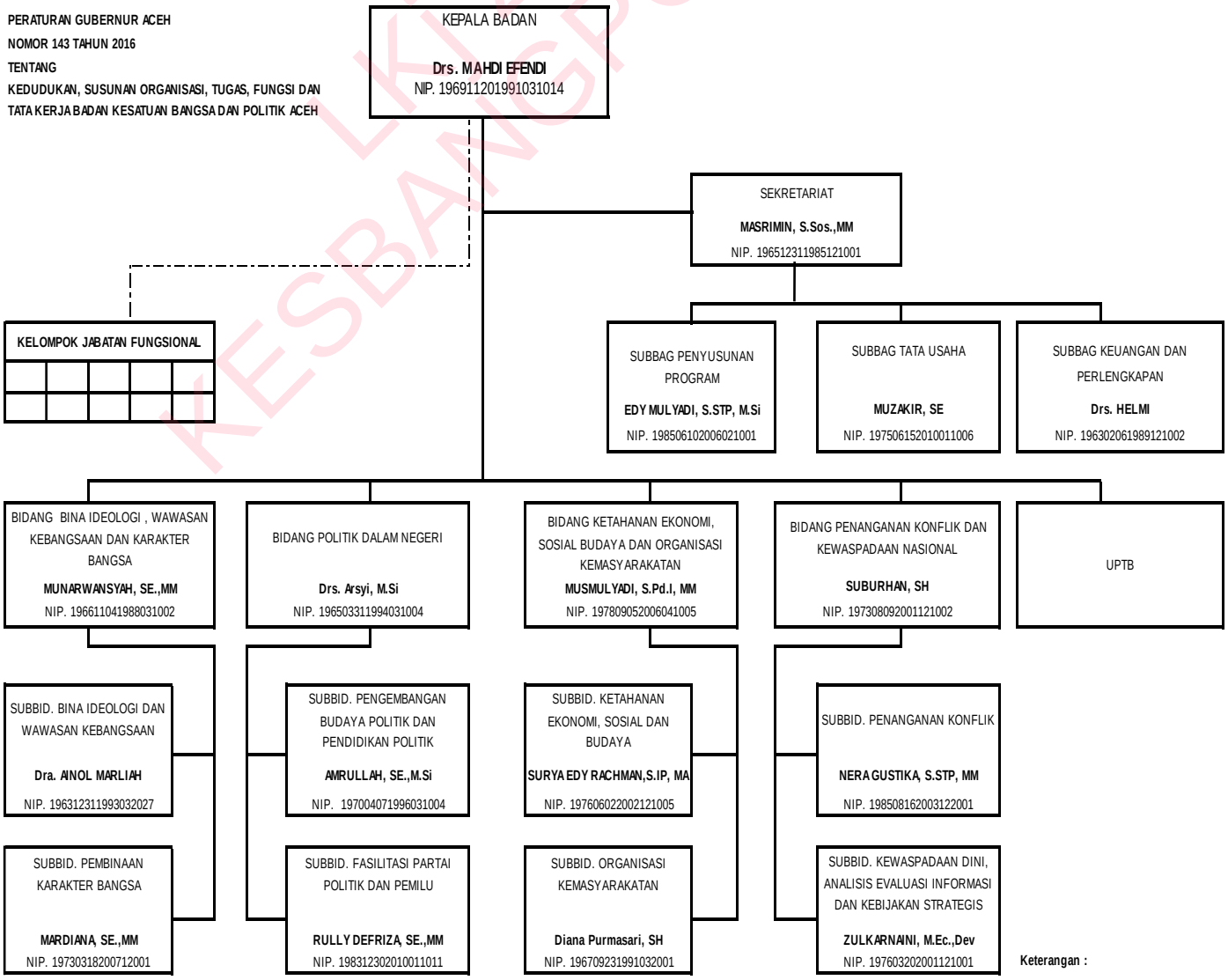

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Keterangan;

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, menkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan Badan;
2. Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
6. Penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
7. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pembinaan UPTB;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
5. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan.Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut :

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
5) Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

6) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
8) Melaksanakan pembinaan staf;
9) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan pemeliharaan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
3) Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
4) Menyusun anggaran kas;
5) Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
7) Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
8) Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan baranginventaris;
9) Mengelola urusan perlengkapan / pengadaanbarang;
10) Melaksanakan pembinaan staf;

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

11) Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
12) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

1) Mengelola urusan surat menyurat dankearsipan;
2) Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
3) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
4) Mengelola urusan kendaraan operasional;
5) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa danpolitik;
6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai NegeriSipil;
7) Menghimpun dan menyusun data pegawai;
8) Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
9) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
10) Melaksanakan pembinaan staf;
11) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpian oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, pelestarian nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter bangsa;
3. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewasapadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
4. Pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;
5. Pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi manusia;
6. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarga negaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika; dan

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu Subbidang antara lain :

1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika.

2. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempuyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang karakter bangsa.

c. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya politik, pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta Pemilu.

HKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
3. Pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
5. Pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Sub Bidang :

1. Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik

Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang pengembangan etika dan budaya politik.

2. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi bidang fasilitasi partai politik dan pemilu

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan

KESBANGPOL ACEH TK I 2020

kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi kemasyarakatan.

e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi, kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
3. Pelaksanaan pembinaan umum bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasai dan pelaporan,

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi penanganan konflik.

2. **Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis**

   dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

1.3.2 Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.

a. Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Aceh.

Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah para Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Mereka adalah perencana, pelaksana dan sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam gerak usaha memperbaiki seluruh aspek tatanan kehidupan. Untuk dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang berupa sikap kreatif, inovatif, berkemampuan keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.

Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada tingkat bawah dalam merespon permasalahan yang dihadapi, apalagi dalam organisasi publik yang sangat paternalistik, kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan puncak, sementara yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa adalah aparatur yang berada pada level bawah.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah motivasi aparatur birokrasi yang relatif masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1.3.2.1 berikut ini :

Tabel. 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	KLASIFIKASI	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	T. KONTRAK
1.	LAKI-LAKI	1	5	8	21	36
2.	PEREMPUAN			3	18	11
3.	**JUMLAH**	**1**	**5**	**11**	**39**	**47**

Grafik. 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon

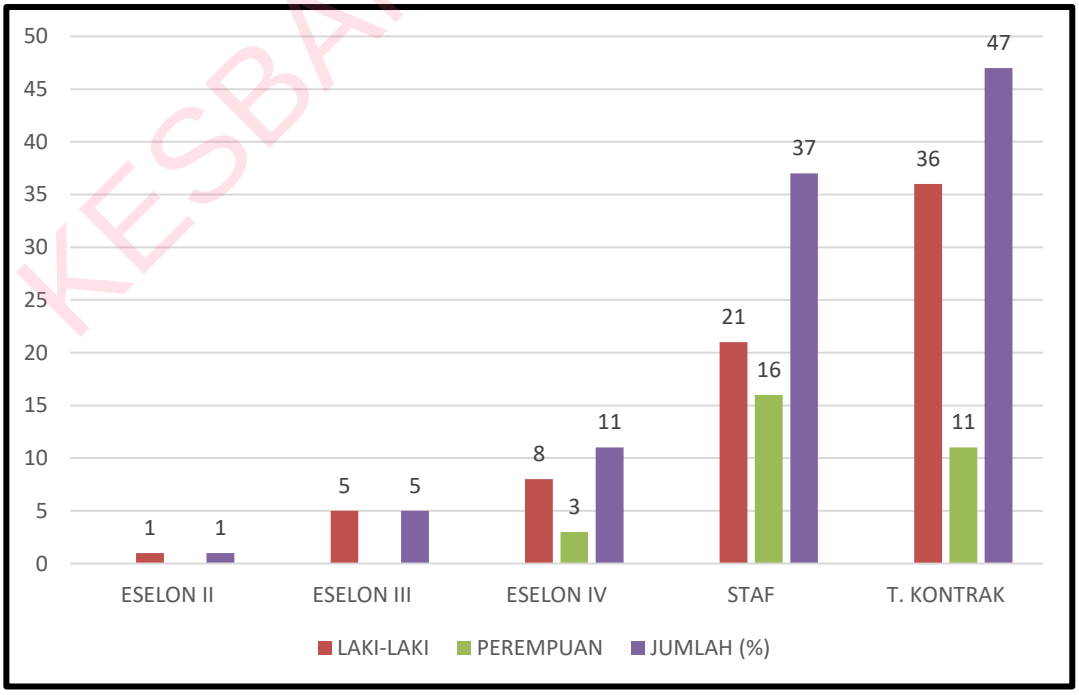

Berdasarkan tabel. 1.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang , sedangkan jumlah kesuluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh berjumlah 103 orang, terdiri dari 56 PNS dan 47 tenaga kontrak yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan sebagai berikut;

LKj 2022 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2
1.	LAKI-LAKI		2		18	14
2.	PEREMPUAN				16	5
3.	**JUMLAH (%)**		**2**	**1**	**34**	**19**

Grafik. 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

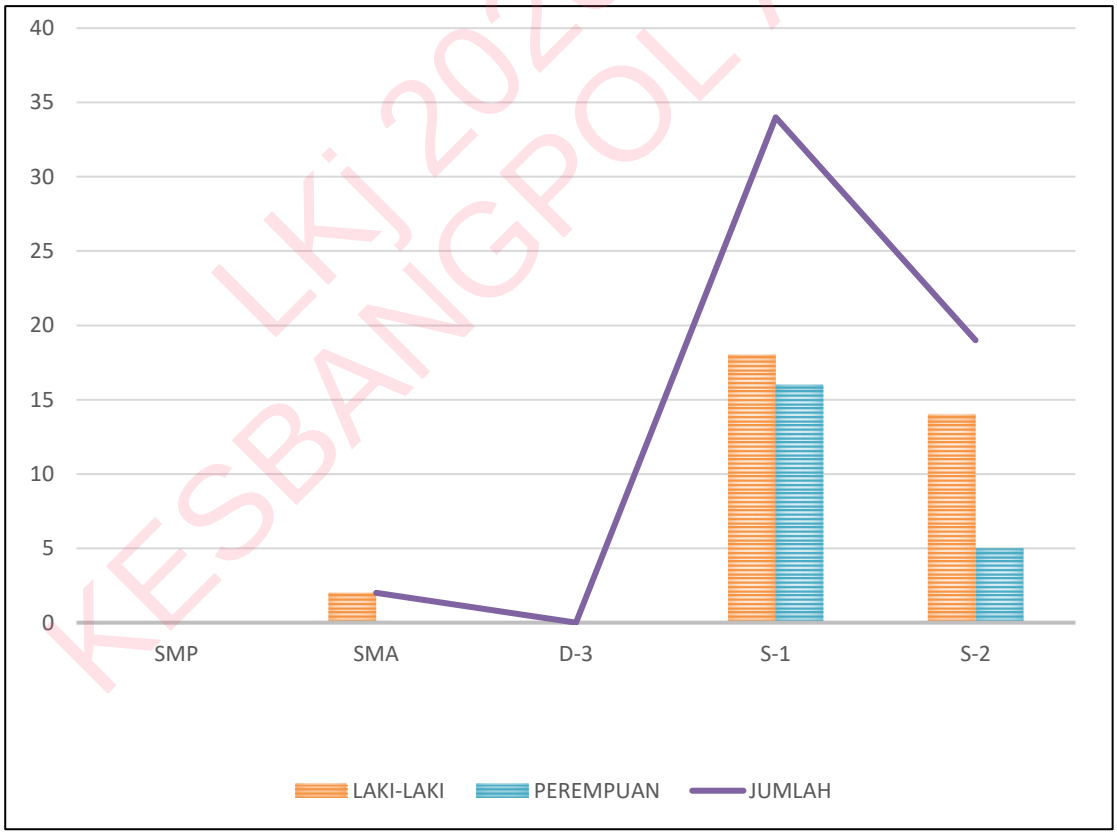

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

Dari tabel 1.2 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 56 pegawai, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh memiliki jenjang pendidikan strata I (S-1) yaitu sebanyak 34 orang selanjutnya PNS dengan tingkat pendidikan strata II (S-2) sebanyak 19 orang kemudian 2 orang dengan tingkat Pendidikan SMA. Secara umum Badan Kesbangpol Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal ini diharapkan agar setiap pegawai dapat terus mengembangkan potensi

yang dimilikinya secara berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya, klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	KLASIFIKASI	I/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1.	LAKI-LAKI			1			1	6	10	6	5	5		1
2.	PEREMPUAN						3	4	4	10				
	JUMLAH			**1**			**4**	**10**	**14**	**16**	**5**	**5**		**1**

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III sebanyak 44 orang, pangkat/golongan II sebanyak 1 orang dan pangkat/golongan IV sebanyak 11 orang. Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan jenjang kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja para pegawai agar terjadinya kesinambungan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama ini mereka terima tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja, artinya baik buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar kecilnya gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi-organisasi swasta, dimana prestasi kerja bisa menentukan besar kecilnya gaji, sehingga para PNS tidak termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja artinya mereka hanya melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para PNS, terutama apabila pendidikan dan pelatihan tersebut memerlukan dana yang cukup besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara personal pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang aktif bekerja

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

dengan pegawai yang tidak disiplin menjalan keseluruhan sebanyak keseluruhan sebanyakkan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan dengan baik mendapatkan penghargaan *(reward)* yang layak sedang pegawai yang melalaikan tugasnya diberikan hukuman disiplin (*punishment*) yang tegas. Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual pegawai, diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran SKPA di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bahkan beasiswa bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan Kesbangpol Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk pengembangan potensi dan wawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol Aceh.

Tabel. 1.4
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

NO	KLASIFIKASI (UMUR)	JUMLAH
1.	20 - 30	1
2.	31- 39	10
3.	40 - 49	20
4.	≥ 50	25

Dari tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 25 orang pegawai yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol Aceh yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi SKPA yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi yang dipediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam kurun waktu 2 tahun mendatang sehingga Badan Kesbangpol Aceh tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 1.5
Komposisi Pegawai Per Bidang

NO	KLASIFIKASI	Sekretariat	Poldagri	Bina Ideologi	Bidang Ketahanan Ekonomi	Bidang Penanganan Konflik
1.	LAKI-LAKI	40	7	6	6	10
2.	PEREMPUAN	13	5	6	5	3
3.	JUMLAH	53	12	12	11	13

b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Aceh.

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja Badan Kesbangpol Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada aspek pengelolaan barang milik daerah, penggunaan asset dan reklasifikasi aset tetap (2020). Berikut disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol Aceh;

Tabel. 1.6
Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penggunaan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

NO	JENIS ASSET TETAP	TOTAL ASSET YANG DIKUASAI SKPD S.D TAHUN 2019	TOTAL ASSET YANG TIDAK DIKUASAI S.D TAHUN 2019	KET.
1.	Tanah	4,601,000,000	-	
2.	Peralatan dan Mesin	10.218.548.645	521.613.915	
3.	Gedung dan Bangunan	13.596.195.706	-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.911.250	-	
5.	Asset Tetap Lainnya	94.169.520	-	
JUMLAH		**29.058.825.121**	**521.613.915**	

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 1.7
Reklasifikasi Aset Tetap s.d Tahun 2019

NO	JENIS ASSET TETAP	REKLASIFIKASI TAHUN 2016	REKLASIFIKASI TAHUN 2017	REKLASIFIKASI TAHUN 2018	REKLASIFIKASI TAHUN 2019	REKLASIFIKASI TAHUN 2020
1.	Tanah	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.888.177.198	1.057.593.324	265.027.156	1.516.637.442	9.614.000
3.	Gedung dan Bangunan	2.500.000	74.096.000	830.020.844	100.000.000	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.378.000	118.607.000	148.782.000	-	-
5.	Asset Tetap Lainnya	9.983.520	30.320.000	4.743.000	-	-
	JUMLAH	**2.047.038.718**	**1.280.616.324**	**1.248.573.000**	**1.616.637.442**	**9.614.000**

1.4. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan Pada Organisasi.

1.4.1 Isu – Isu Strategis

1. Eufhoria Reformasi

   Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomali reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama , Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat danpartisifasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

2. Lahirnya UUPA sebagai Amanah dari MoU Helsinki

   Kepercayaan (trust) menjadi prinsip dasar dalam penyusunan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu juga didukung oleh keterlibatan semua pihak yang terkait dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

UUPA lahir sebagai upaya regulasi untuk membangun kepercayaan yang melahirkan perdamaian setelah terjadinya konflik di Aceh. Hal ini sangat penting adanya suatukepercayaan bahwa undang-undang ini menjadi sebuah produk perundang-undangan yang mewakilkan isi MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Adapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan memberikan fasilitas semua pihak untuk mengeluarkan aspirasi. Sesensitif apapun permasalah tidak ada yang tidak dapat diselesaikan selama aspirasi tersebut tersampaikan dan tidak ada yang tersakiti.

3. Kemajemukan/keragaman dalam beragama

   Dalam kerangka heterogenitas Provinsi Aceh dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman beragama maupun suku bangsa. Di Provinsi Aceh yang julukannya sebagai Serambi Mekah terdapat 6(enam) Agama, tetapi dalam perjalanan kehidupan umat beragama selama ini tidak terjadi permasalahan yang memicu kepada perpecahan antar umat Beragama. Agama yang terdapat di Provinsi Aceh diantaranya adalah Agama Islam, Kristen Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

   Namun hadirnya 6 (enam) Agama di Aceh ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan. Disamping itu terdapatnya pemeluk agama Islam yang mayoritas dari agama-agama yang lain yang ada di Aceh, dapat menjadi sebuah masalah baru dalam kehidupan beragama. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Aceh, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Munculnya konflik antar umat beragama yang saat ini masih kurang mendapat perhatian, seakan-akan ada pembiaran sekelompok masyarakat yang melakukan demo dan pengrusakan, hingga pembakaran terhadap oknum dan fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

4. Globalisasi

Terminology Globalisasi memiliki arti yang sangat umum, belum mempunyai arti yang mapan dan istilah globalisiasimuncul dari negara adi kuasa sehingga memiliki panorama negatif terhadap negara di bawahnya.

Terlepas dari semua itu tren globalisasi tidak dapat dinafikanlagi, globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peranyang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Salah satu efeknya adalah munculnya sistem ekonomi Pasar bebas / FTA yang meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa bekompetisi akan bangkrut dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tata nilai kebudayaan bangsa salah satunya ditandai dengan munculnya *Westernisasi* yang merupakan salah satu bentuk dari universalisasi budaya dan tata nilai kehidupan dari "barat" yang kebanyakan menganut gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.

Apabila hal tersebut diatas tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol Aceh akan menimbulkan persoalan instabilitas NKRI yakni terjadinya ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah, Perpecahan, terror dan intimidasi hingga pemisahan diri dari pemerintah pusat.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis pada Pelayanan Organisasi

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

internal yang mencakup kelemahan (*weaknesses*/W) dan kekuatan (*strenghts*/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunities*/O) dan ancaman (*threats*/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sarasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

a. Analisis Lingkungan Internal

Strength (S)/Kekuatan

1. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
3. Situasi Kerja yang harmonis (tim work);
4. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan)

Weaknesses (W)/Kelemahan

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip '*the right man in the right place*' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal;

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik secara faktual maupun secara aktual;
6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Opportunities (O)/Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinski dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong;
5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;
6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 5.066.531 jiwa;
7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi;
8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

Threats (T)/Ancaman

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh;

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan Orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;
13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
14. Rentannya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme keagamaan.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 1.8
Analisis Lingkungan Strategis

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL / ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	Peluang / Opportunities	Ancaman / Threats
	1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat; 2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinski dan keluarnya Undang-undang nomor 11tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong; 5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh; 6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 jiwa; 7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi; 8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat; 9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus. 10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;	1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh; 2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; 3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat; 4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat; 5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan; 6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik di Kab/kota sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi; 8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan: 9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif; 10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata; 11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat; 12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan; 13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat; 14. Rentanya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme keagamaan.

LKPJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Kekuatan / Strengths	S – O	S – T
1. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 3. Situasi Kerja yang harmonis (tim work); 4. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan).	1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai; 2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan; 3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik; 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan.	1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas; 2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanandan ketertiban di masyarakat; 3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat; 4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai lubur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.

IKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Kelemahan / Weakness	W – O	W – T
1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip '*the right man in the right place*' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi; 2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan; 3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai; 4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal; 5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual; 6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja; 7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.	1. Untuk meningkatkan harmonisas hubungan antar lembagai diharapkan peranan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya, agar terciptanya stabilitas politik di Provinsi Aceh; 2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman; 3. pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat; 4. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 5. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.	Untuk Meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi di lakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur Internal & ekternal Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Aceh

2.1.1. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022

Visi

"TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAH YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"

Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakatdengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

g. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

IKU 2020 KESBANGPOL ACEH

h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;
i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini dari 9 misi terkait dalam Misi Ke-3 yaitu: ***Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;*** melalui Misi ke-3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai seuai dengan prinsip- prinsip Mou helsinki secara konsisten dan komprehensif. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Pada 9 misi tersebut dijabarkan dalam 15 keunggulan Aceh Hebat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini terkait dengan Misi ke-3 dan dijabarkan dalam keunggulan Aceh Hebat ke-10, dengan:

Tujuan : **Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou Helsinki**;

Sasaran : ***Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;***

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022:

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki	Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh
			Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	Jumlah konflik Sara yang tertangani
		Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial dimasyarakat
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	Persentase Konflik yang tertangani
			Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani
2	Meningkatnya peran demokrasi indonesia didalam pembangunan	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	:	**"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani"**
MISI III	:	**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki	1. Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	1. memberdayakan LSM/Ormas/Yayasan didalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatkan peran LSM/Ormas/Yayasan dalam memelihara perdamaian
	2. Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	2. Membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, ideologi ,karakter dan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kesadaran bela Negara	2. Meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang nilai-nilai kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, karakter,ideologi, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
	3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	3. Menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan saling gotong royong	3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
	4. Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	4. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya	4. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat majemuk
	5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	5. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif	5. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penguatan Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI
Meningkatnya peran demokrasi indonesia didalam pembangunan	1. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	1. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut:

1. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
2. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri;
6. Program Pembauran Kebangsaaan;
7. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
8. Program Penanganan Konflik.

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

Tabel 2.3 Sasaran Program Kegiatan RPJMA 2017-2022

No.	Bidang Urusan	Sasaran Strategis	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi awal	Tahun-1(2018)	Tahun-2(2019)	Tahun-3(2020)	Tahun-4(2021)	Tahun-5(2022)
							Target	Target	Target	Target	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*
I	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/ORMAS/YAYASAN di dalam Pembangunan Daerah	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar		35	25	25	22	21	23
		Meningkatnya Indek Demokrasi Indonesia.	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	Persentase jumlah pemilih	73,00%	73,00%	73.01%	73.01%	73.01%	73.01%
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat.	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	jumlah SMA yang mendapat pembinaan per jumlah SMA seluruh Aceh	481	10%	20%	30%	40%	50%
			Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	4 peserta dari setiap kecamatan di Aceh (289 kecamatan) data BPS	1156	19,90%	39,79%	59,69%	79,58%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh	Program Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	jumlah kasus tertangani per potensi konflik di Aceh	95,54%	96,04%	96,54%	97,54%	98,04%	98,54%
			Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani	Jumlah kasus tertangani per jumlah ancaman yang terdeteksi/dilaporkan	88,24%	89,24%	90,24%	90,74%	91,24%	93,24%
		Mewujudkan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial dimasyarakat	Jumlah kasus tertangani per kasus yang terdeteksi	967	10,34%	20,68%	31.02%	41,37%	54,71%
		Meningkatnya Peran Serta Keberagaman Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh.	Program Pembauran Kebangsaan	jumlah konflik Sara yang tertangani		3	3	4	4	5	5

KESBANGPOL ACEH LKI2020

2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020.

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Gubernur Aceh selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Aceh dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol AcehTahun 2017-2022. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesbangpol dan Tahun 2020.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya *(Performance Agreement).* Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran *(budgeting process)* selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan di dalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	37
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani	97,54%
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	7

Program	Anggaran
1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1.060.618.001
2. Penanganan Konflik	Rp 1.304.050.488
3. Politik Dalam Negeri	Rp 1.816.612.866

Plt. Gubernur Aceh

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Banda Aceh, 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Drs. MAHDI EFENDI

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 2.4
Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	25 LSM/Ormas/Yayasan
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$	96,5 %
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	7

No	Program	Anggaran	
1	Pendidikan Politik Dalam Negeri	Rp.	930.656.616
2	Pembauran Kebangsaan	Rp.	222.134.458
3	Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang	Rp.	84.178.202
4	Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wasbang	Rp.	0
5	Pembinaan dan pemberdayaan Ormas	Rp.	266.914.780
6	Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Rp.	164.993.300
7	Penanganan Konflik	Rp.	141.667.747
8	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Rp.	1.990.949.291

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pada Penetapan Kinerja

- **Penghargaan/Prestasi atas capaian Kinerja yang diperoleh Tahun 2020**

Nama Penghargaan	Kategori Peringkat Penghargaan	Instansi Penilai	Pejabat yang Menyerahkan	Yang Menerima
Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Tim Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Peringkat 9 Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Gambar. 3.1

Penyerahan Piagam Penghargaan Capaian Kinerja Tim Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 di Hotel A One Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa 23 Februari 2021

HKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/ Yayasan yang terdaftar	37 LSM/Ormas/ Yayasan	50 LSM/Ormas/ Yayasan	100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani Jumlah potensi konflik yang tertangani / jumlah potensi konflik yang dilaporkan	96,5 %	96,7 %	100
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	7	5	71,42

IKU 2020 KESBANGPOL ACEH

3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel. 3.2
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 s/d 2020

Indikator Kinerja		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*
1)	Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	130.60%	99.07%								
2)	Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	107.79	84.50%								
1)	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.**(Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)**	29			15	157 kasus								
2)	Jumlah kriminalitas yang tertangani		62%	32	34									
3)	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.				18									
4)	Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun					317 Pengunjung								
5)	Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah					1 dokumen								
7)	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	502,174									
8)	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	-	7,784 per desa	-	3,332									

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

Indikator Kinerja		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1)	Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan					2 Kegiatan	2 Kegiatan						
2)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara.					4 Kegiatan	3 Kegiatan						
3)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.					3 Kegiatan	3 Kegiatan						
1)	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.					3 Kegiatan	3 Kegiatan						
1)	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar							25 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	25 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	50 LSM/ Ormas/ Yayasan
1)	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$							96%	96%	96,5%	96,7%	97,54%	97,77%
1)	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah											7 kegiatan	5 kegiatan

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target Renstra
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. **(Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan suprastruktur politik daerah)**	1)	Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	130.60%	99.07%							80%
		2)	Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	107.79	84.50%							90%
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.**(Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian).**	1)	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani.**(Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)**	29			15	157 kasus							
		2)	Jumlah kriminalitas yang tertangani		62%	32	34								
		3)	Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.				18								
		4)	Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun					317 Pengunjun							
		5)	Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah					1 dokumen							
		7)	Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	502,174								
		8)	Rasio Poskamling per jumlah Gampong.		7,784 per desa		3,332								

LKIP 2020 KESBANGPOL ACEH

Indikator Kinerja		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Renstra
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15
1)	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah					6 Kegiatan	6 Kegitatan			7 kegiatan	7 kegiatan			
1)	Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan					2 Kegiatan	2 Kegiatan							
2)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi					4 Kegiatan	3 Kegiatan							
3)	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.					3 Kegiatan	3 Kegiatan							
1)	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.					3 Kegiatan	3 Kegiatan							
1)	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar							25 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	25 LSM/ Ormas/ Yayasan	51 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan	50 LSM/ Ormas/ Yayasan	37 LSM/ Ormas/ Yayasan
1)	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$							96%	96%	96,5%	96,7%	97,54%	97,77%	97,54%
1)	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah											7 kegiatan	5 Kegiatan	73,01%

LKi 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4 Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*.

3.4.1 Analisis Capaian kinerja pada Penetapan Kinerja

3.4.1.1. Analisis penyebab keberhasilan Sasaran Strategis I : Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah

Tabel. 3.4

Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan/Perkumpulan Yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2017-2020

No	Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Organisasi Kemasyarakatan		12	14	6
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	16			4
3	Yayasan / Perkumpulan	18	25	37	40
Jumlah		34	37	51	50

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK KemenkumHam Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2020 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM.

Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan dikeluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2020 sebanyak 17 Ormas/LSM memberikan berkas permohonan dan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM tersebut sebanyak 10 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 48 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor sebanyak 40 Yayasan/Perkumpulan, sementara 8 Yayasan/Perkumpulan belum dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4.1.2. Analisis Program kegiatan Sasaran Strategis I : Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah

A. Program Pembinaan dan pemberdayaan Ormas

a) Sosialisasi Regulasi Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SESUAI PERMENDAGRI NO. 57 TAHUN 2017

1. Surat Permohonan Pendaftaran Ormas/LSM;
2. Salinan/fotocopy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART);
3. Program kerja;
4. Biodata pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sebutan lainnya);
5. Pas foto berwarna pengurus organisasi, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 bulan terakhir;
6. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas;
7. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
8. Foto kantor atau sekretariat Ormas yang memuat papan nama;
9. Surat Keterangan Domisili sekretariat Ormas;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas;
11. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan ditandatangani dengan materai 6000;
12. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
13. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengen Partai Politik;
14. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

15. **Rekomendasi dari kementerian** yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
16. **Rekomendasi dari kementerian** dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
17. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas
18. Formulir isian data Ormas (sesuai format lampiran Permendagri Nomor 57 tahun 2017)

SELAIN PERSYARATAN DIATAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN JUGA MELAMPIRKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Formulir isian data Ormas (Form terlampir)
2. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, bermaterai Rp. 6000, ditanda tangani Ketua/Sekretaris (Form terlampir)
3. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah (ditanda tangani Ketua/Sekretaris)
4. Rekomendasi dari kementrian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk ormas yang memiliki "**kekhususan bidang keagamaan"**
5. Rekomendasi dari kementrian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang **"memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa"**
6. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama organisasi :
2. Nama Notaris :
3. Nomor dan Tgl Akta Notaris :
4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan :
5. Bidang Kegiatan :
6. Program Kerja Ormas :
7. Alamat Kantor/Sekretariat :
8. Tempat dan Waktu Pendirian :
9. Asas Ciri Organisasi :
10. Tujuan Organisasi
11. Nama Pendiri : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telp/hp, pekerjaan)
12. Nama Pembina :
13. Nama Penasehat :
14. Biodata Pengurus
    A. Ketua/Sebutan Lain :
    B. Sekretaris/Sebutan Lain :
    C. Bendahara/Sebutan Lain :
15. Masa Bakhti Kepengurusan :
16. Keputusan Tertinggi Organisasi :
17. Unit/Cabang :
18. NPWP :
19. Sumber keuangan :
20. Lambang/logo organisasi
21. Bendera organisasi :

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

KOP SURAT ORMAS

Surat Pernyataan

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :
   Jabatan : Ketua/Sederajat
   Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
b. Nama :
   Jabatan : Sekretaris/Sederajat
   Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
c. Nama, lembaga, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ketua,	Sekretaris,
(Cap stempel dan ditandatangani)	(Tanda tangan)
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN SURAT TANDA LAPOR UNTUK YAYASAN/PERKUMPULAN

1. Surat Pemohonan;
2. Akta Notaris yang memuat AD/ART;
3. Foto Copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. SK Kepengurusan;
5. Surat Keterangan domisili organisasi;
6. Foto Copy KTP pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
7. Biodata pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

b) Pengelolaan Data Base Ormas dan LNL

Pengelolaan database Ormas/LSM pada tahun 2020 menggunakan Aplikasi SIOLA yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, total jumlah permohonan SKT ormas melalui Badan Kesbangpol Aceh selama tahun 2020 adalah sebanyak 17 Ormas/LSM, yang telah mendapatkan SKT adalah sebanyak 10 Ormas/LSM, enam Ormas/LSM belum dikeluarkan SKT karena belum memenuhi syarat, sedangkan satu Ormas ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan bukan Ormas, tapi Perkumpulan

Data Ormas/LSM yang telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh dilakukan pencatatan dalam Buku Direktori Ormas/LSM. Perkembangan fasilitasi Ormas, LSM dan Lembaga lainnya dapat disajikan pada tabel berikut:

c) Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan telah dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan FGD sebanyak 2 Kabupaten yaitu;
   1. Kabupaten Pidie, dengan jumlah peserta 40 orang terdiri dari pengurus Ormas, LSM dan Yayasan dan narasumber Musmulyadi, S.Pd.I.,MM (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat), Mayor Arm. Musani, S.Pd., M.Sc (Kasdim

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

0102/Pidie), Drs. Zulfikar, MM (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie).

2. Kabupaten Bener Meriah, dengan jumlah peserta 20 orang terdiri dari pengurus Ormas, LSM dan Yayasan dan narasumber Drs. Jamhuri, MA (Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh),

Tabel 3.5
Pemberian Hibah Kepada Lembaga Tahun 2017 – 2020
Di Provinsi Aceh

No	Ormas/ Lembaga/Instansi	Bantuan Hibah								Ket
		2017		2018		2019		2020		
		Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	Jumlah (Rp)	No SK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.500.000.000	SK Gub, 220/657 /2017, 22 Juni 2017	2.000.000.000	SK Gub, 220/729/2018 11 Juli 2018	500.000.000	SK Gub, 903/868/ 2019, 10 April 2019	-	-	
2	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)			102.000.000	SK Gub, 220/729/2018 11 Juli 2018			-	-	
3	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)			493.880.000	SK Gub, 220/729/2018 11 Juli 2018	100.000.000	SK Gub, 815/1656 /2019, 11 Oktober 2019	-	-	
4	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh					2.000.000.000	SK Gub, 903/868/ 2019, 10 April 2019	-	-	

Pemerintah Aceh telah menyalurkan dana bantuan keuangan sebesar. **Rp. 6.695.880.000,-** ***(Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*** hingga tahun 2020 kepada organisasi kemasyarakat sebagai bentuk kerja sama pemerintah dengan organisasi massa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (dalam kurun waktu tahun 2017-2020, sementara 2017 hanya ada bantuan untuk lembaga PMI Prov. Aceh saja Rp. 1.500.000.000,-. Untuk tahun 2018 ada 3 (tiga) ormas,LSM/Lembaga Nirlaba lainya yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dengan total Rp. 2. 595.880.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sementara untuk tahun 2019 ada 3 ormas,LSM/ Lembaga Nirlaba lainya yaitu Palang Merah Indonesia

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

(PMI) Provinsi Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP) Aceh dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh dengan total keseluruhan Rp.2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Pada Tahun 2020 pengajuan untuk bantuan hibah tidak diberikan kepada Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya dikarenakan adanya *recofusing* anggaran disebabkan COVID-19.

Pengajuan permohonan proposal yang masuk kepada Pemerintah Aceh baik yang ditujukan langsung maupun proposal yang diteruskan ke Badan Kesbangpol Aceh rata-rata berkisar 30 s/d 50 an proposal rata-rata tiap tahunnya namun Pemerintah Aceh melalui Badan Kesbangpol Aceh.

d) Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing

Rekomendasi untuk organisasi Asing adalah :

- Mendirikan ormas asing harus mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri baik itu izin prinsip maupun izin operasional;
- Bagi ormas asing yg telah habis masa berlakunya agar melaporkan ke Kementerian Luar Negeri karena tidak boleh melapor masa berakhir SKT nya di tingkat daerah;
- Bagi ormas yang melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan ke Kementerian Luar Negeri.

a. Kegiatan berdasarkan kinerja:

a) Jumlah Organisasi Asing di Aceh

- Tahun 2016 : 0 Ormas
- Tahun 2017 (Habis Masa berlaku) : 7 Ormas
- Tahun 2018 (Habis Masa berlaku) : 9 Ormas
- Tahun 2019 (Habis Masa berlaku) : 2 Ormas

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 3.6
Ormas Asing di Provinsi Aceh

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
1.	Christoffel Blinden Mission (CBM)	1/10/2014 – 30/9/2017	Kemenkes	-
2.	Conservation International	26/9/2014 – 25/9/2017	KLHK	-
3.	Fauna and Flora International (FFI)	25/7/2014 – 24/7/2017	KLHK	-
4.	Handicap International	3/2/2014 – 2/2/2017	Kemensos	-
5.	Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)	Perpanjangan selama 1 tahun (2018)	Kemenkes	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
6.	Liga Muslim Dunia (Muslim Wolrd League)	18/8/2015 – 17/8/218	Kemenag	-
7.	Lutherab World Relief (LWR)	Dalam proses perpanjangan	Kemenko PMK	-
8.	Muslim Aid	20/10/2014 – 19/10/2017	Kemensos	-
9.	Netherlands Leprosy Relief (NLR)	27/11/2014 – 26/11/2017	Kemenkes	-
10.	Orangutan Foundation (OF-UK)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
11.	PanEco	Dalam proses perpanjangan	KLHK	-
12.	Rare Animal Relief Effort (RARE)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-
13.	Qatar Charity	28/1/2015 – 27/1/2018	Kemenag	-
14.	Save The Children International (SCI)	Berakhir sampei dengan 3/4/2020	Kemensos	-
15.	SurfAid	29/8/2014 – 28/8/2017	Kemenkes	-
16.	Wildlife Conservation Society (WCS)	2015/04/01 – 2018/03/31	KLHK	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
17.	American Friends Service Committee (AFSC)	Berakhir sampai dengan 23/5/2020	Kemensos	Banda Aceh Kab. Aceh Besar
18.	Islamic Relief Worldwide	3/2/2015 – 3/2/2018	Kemendagri	Banda Aceh Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh
19.	Swiss Contact (SC)	3/12/2016 – 6/2/2019	Kemendagri	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun

LKI 2020
KESBANGPOL ACEH

3.4.1.3. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis I

Tabel 3.7
Analisis Tingkat Efesiensi Berdasarkan Anggaran
Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
						ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/ Yayasan didalam pembangunan daerah	**Jumlah LSM/Ormas /Yayasan yang terdaftar**	**37 LSM/ Ormas/ Yayasan**	**50 LSM/Ormas/ Yayasan**	**135**	**A. Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	**266.914.780**	**256.415.652**	**96,07**	**38,93**
					a. Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat	0	0	0,00	**0,00**
					b. Pengelolaan Database Ormas dan LNL	76.778.606	75.414.875	98,22	**36,78**
					c. Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan LNL	98.795.822	98.062.271	99,26	**35,74**
					d. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL	27.863.049	27.862.956	99,9	**35,10**
					e. Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing	0	0	0,00	**0,00**
					f. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas/LNL	63.477.303	55.075.550	86,76	**48,24**

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Berdasarkan Tabel 3.7, secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mempunyai range nilai yang besar dengan antara capaian kinerja sebesar 348 % dengan realisasi anggaran sebesar 96,07%. Sehingga tingkat efisiensi anggaran menjadi tinggi Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor internal organisasi dan berpengaruh terhadap capaian kinerja, diantaranya sesuai Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan maka SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan dan kegiatan pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian Capaian Kinerja sesuai target pada Perjanjian Kerja.

3.4.1.4. Analisis penyebab keberhasilan Sasaran Strategis II: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh

Dalam Pencapaian Keberhasilan Sasran Strategis II dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Bentuk Pencegahan dan penanganan Konflik oleh Badan Kesbangpol Aceh dilakukan dengan kegiatan :
   a. Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial;
   b. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh;
   c. Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
   d. FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik;
   e. Dialog Capaian Penanganan Konflik;
   f. Survey Capaian penanganan Konflik;
   g. FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme;
   h. Renungan dan Edukasi Perdamaian Bagi Pelajar;
   i. Edukasi Pencegahan Paham Radikal Bagi Pelajar;
   j. FGD Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh;
   k. Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
   l. Kajian Analisis Situasi Kondisi Daerah;
   m. Monitoring dan Evaluasi.

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

2. Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan serangkaian kegiatan dalam penanganan permasalahan lahan antara perusahaan dengan masyarakat, diantaranya melakukan mediasi dan koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan permasalahan lahan di Aceh. Setiap permasalahan yang telah diselesaikan dilakukan ekspose dengan memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kesepakatan antar pihak.

3. Upaya yang sudah dilakukan terkait klaim wilayah yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara terhadap wilayah Aceh adalah melalui pembicaraan antara Pemerintah Aceh dengan Pemprov Sumut terkait klaim tersebut, dan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan menunjukkan bukti-bukti agraria bahwa derah tersebut masuk dalam wilayah Aceh.

4. Beberapa kasus menonjol berupa bentrok massa dan tindakan anarkis dapat ditangani oleh aparat keamanan dan dilakukan mediasi, diantaranya kasus bentrok massa di Kec. Muara Tiga (Laweung), Pidie dan kasus pembakaran kantor Polsek Bendahara, Aceh Tamiang. Dalam kasus bentrok massa di Laweung, Pidie, aparat keamanan dan Forkopimda Pidie turun langsung ke lokasi untuk mengamankan bentrokan, serta melakukan mediasi antara pihak yang bertikai. Sedangkan dalam kasus pembakaran Mapolsek Bendahara, Aceh Tamiang, Kapolda Aceh beserta Forkopimda Aceh Tamiang langsung turun ke lokasi dan menemui keluarga korban. Kapolda mengambil tindakan dengan mencopot Kapolsek dan 5 orang anggotanya.

LKI 2020
KESBANGPOL ACEH

3.4.1.5. Analisis Program kegiatan Sasaran Strategis II Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh

A. Program Penanganan Konflik.

Tabel. 3.8
Potensi Konflik yang Dilaporkan dan Tertangani Selama Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	KONFLIK LAHAN	KONFLIK SARA	KONFLIK INDUSTRIAL	KONFLIK SUMBERDAYA	KONFLIK POLITIK				BENDERA		KRIMINAL			ANARKIS / AMUK MASSA	JUMLAH	SELESAI	TIDAK SELESAI
						KEBIJAKAN	BATAS DAERAH	PILKADA	PEMILU	BULAN BINTANG	ALAM PEUDEUN	BERSENJATA API	TEROR	LAIN-LAIN				
1	Banda Aceh	-	1	-	2	35	1	-	4	-	-	1	2	2	3	51	51	0
2	Aceh Besar	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	12	0
3	Sabang	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0
4	Pidie	3	-	-	3	10	1	-	-	-	-	1	-	1	1	20	20	0
5	Pidie Jaya	-	-	-	3	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	10	10	0
6	Bireuen	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	2	-	-	-	10	10	0
7	Aceh Utara	-	-	-	2	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	11	10	1
8	Lhokseumawe	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	12	11	1
9	Aceh Timur	-	-	1	4	11	-	2	-	-	-	-	1	1	-	20	20	0
10	Langsa	-	-	1	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0
11	Aceh Tamiang	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	8	0
12	Bener Meriah	1	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	1	1	-	16	15	1
13	Aceh Tengah	-	-	1	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0
14	Gayo Lues	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	0
15	Aceh Tenggara	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	1
16	Aceh Jaya	1	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	10	1
17	Aceh Barat	1	1	3	3	25	-	3	-	-	-	1	2	1	-	40	40	0
18	Nagan Raya	1	-	4	5	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	20	0
19	Aceh Barat Daya	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	10	0
20	Simeulue	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	0
21	Aceh Selatan	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	0
22	Subulussalam	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	8	1
23	Aceh Singkil	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1
JUMLAH INSIDEN		9	2	12	36	201	2	11	4	0	0	7	10	14	7	315	308	7
PERSENTASE POTENSI KONFLIK YANG TERTANGANI (%)																97,77%		

Rumusan : **persentase potensi konflik yang tertangani**

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} x\ 100\% \ ; \ \frac{308}{315} x\ 100 = 97,77\ \%$$

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa ada 315 potensi konflik yang dilaporkan dan 308 potensi konflik yang tertangani selama tahun 2020. Terdiri atas beberapa kriteria konflik yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut :

KESBANGPOL ACEH LKI 2020

Berdasarkan data potensi konflik tertinggi adalah konflik politik yang berbasis kebijakan berupa unjuk rasa dan protes masyarakat terkait kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Konflik kebijakan didominasi oleh pengelolaan dana desa yang menimbulkan sejumlah protes dan aksi dari masyarakat, serta kebijakan pemerintah lainnya terkait bantuan kepada masyarakat yang terkena imbas pandemic covid-19, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan lainnya. Selain itu yang cukup menonjol adalah permasalahan terkait proyek pembangunan di sejumlah wilayah di Aceh yang menggunakan skema tahun jamak (multi years) yang ditentang oleh sejumlah anggota DPRA karena dinilai tidak diajukan melalui prosedur yang benar, sehingga dibatalkan melalui keputusan DPRA. Namun keputusan ini disesalkan oleh sejumlah pihak, terutama para kepala daerah (Bupati/Walikota) karena dinilai dapat menghambat pembangunan di daerah, terutama membuka jalur transportasi antar daerah.
- Kota Banda Aceh memiliki angka potensi konflik tertinggi didominasi oleh konflik politik terkait kebijakan karena merupakan wilayah ibu kota provinsi sehingga sering dijadikan tempat berunjukrasa.
- Konflik politik yang menonjol terkait Pemilu disebabkan adanya permasalahan terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baik di tingkat DPRA maupun di tingkat DPRK, serta konflik antara Bupati Aceh Tengah dengan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- Konflik terkait Pilkada pada periode ini konflik di internal partai politik terkait kepengurusan, seperti yang terjadi di Partai Aceh (PA), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Aceh (PNA).
- Potensi Konflik lahan tetap menonjol disebabkan sulitnya penyelesaian sengketa lahan, baik dari sisi regulasi maupun mediasi.
- Potensi konflik industrial menandakan perlunya pemantauan terhadap kegiatan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan CSR, saah satu kasus yang menonjol adalah terkait pembayaran upah bagi tenaga clening service dan perawat honor di RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

- Potensi konflik Sumberdaya sebagian besar disebabkan masih maraknya illegal logging, dan penambangan illegal (galian C).
- Kasus konflik terkait tapal batas daerah didominasi permasalahan tapal batas antar desa yang belum dapat diselesaikan pihak Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- Kriminalitas yang cukup menonjol adalah terjadinya sejumlah kejahatan menggunakan senjata api yang menunjukkan masih rawannya peredaran senjata api illegal di masyarakat. Selain itu kasus teror juga terjadi, diantaranya teror terhadap sejumlah pejabat daerah, serta wartawan. Sedangkan kasus criminal lainnya didominasi ujaran kebencian yang marak terjadi di media sosial, yang dilaporkan oleh pihak yang dirugikan ke kepolisian.

Gambar. 3.2
Peta Potensi Konflik yang Menonjol Tahun 2020

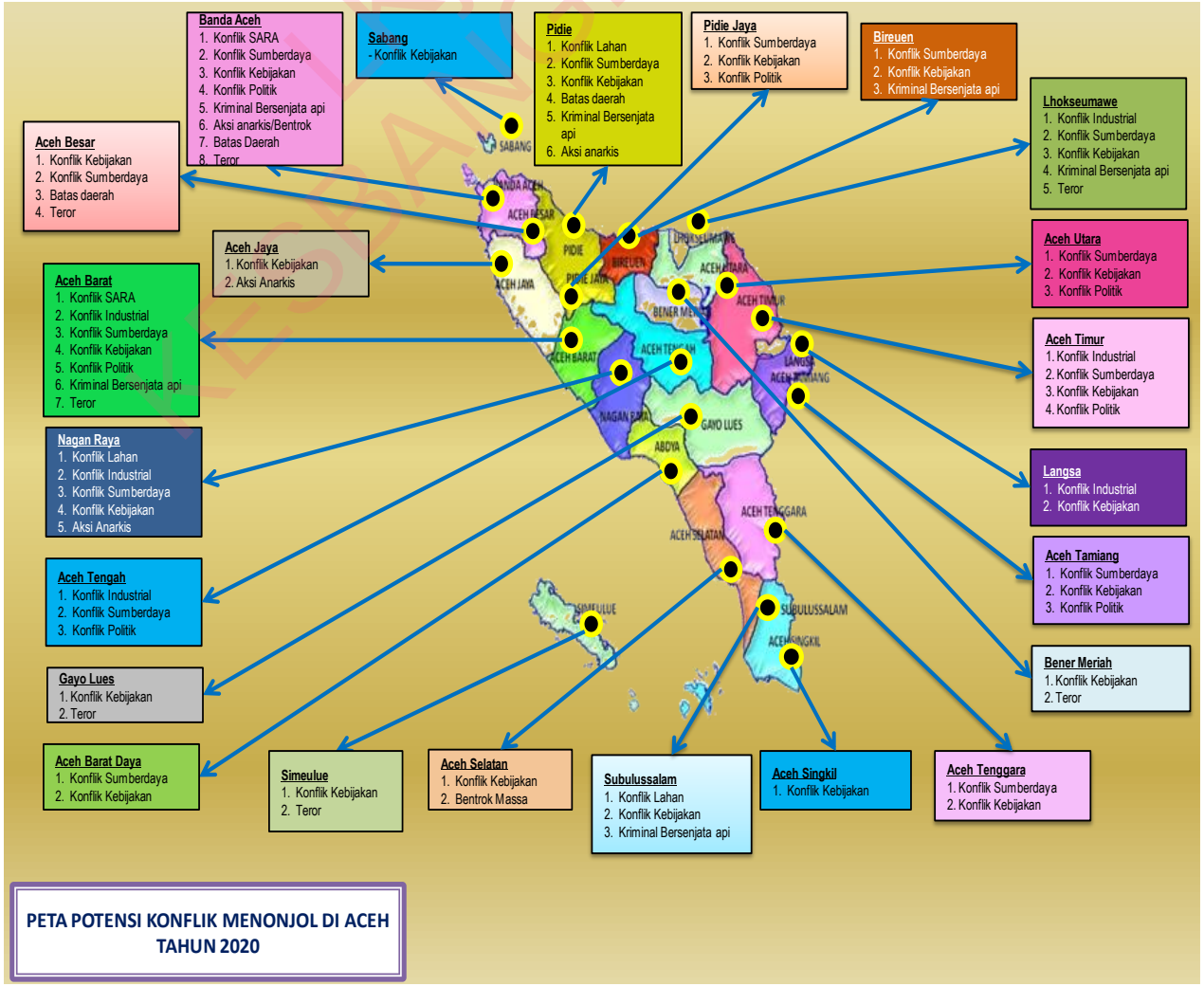

KESBANGPOL ACEH 2020

a. Koordinasi Penanganan Konflik

Potensi konflik dan permasalahan menonjol tahun 2020.

1. Jumlah potensi konflik dan permasalahan menonjol berdasarkan jenis dan sebaran sebanyak 315 insiden:

- **Berdasarkan jenis:**

Konflik lahan	: 9 insiden (2,9%)
Konflik SARA	: 2 insiden (0,6%)
Konflik Industrial	: 12 insiden (3,8%)
Konflik Sumber daya	: 36 insiden (11,4%)
Konflik Politik	: 201 (kebijakan) 63,8%, 2 (batas daerah) 0,6%, 11 (pilkada) 1,3%, 4 (pemilu) 1,3%
Konflik bendera	: 0 (bulan bintang) dan 0 (alam peudeung)
Kriminal	: 7 insiden (bersenjata api) 2,2%, 10 insiden (terror) 3,2%, 14 insiden (kriminal lainnya) 4,4%
Anarkis/Bentrok massa	: 7 insiden 2,2%

- **Berdasarkan wilayah :**

- Banda Aceh	: 51 insiden (16,2%)
- Aceh Besar	: 12 insiden (3,8%)
- Sabang	: 3 insiden (1,0%)
- Pidie	: 20 insiden (6,3%)
- Pidie Jaya	: 10 insiden (3,2%)
- Bireuen	: 10 insiden (3,2%)
- Aceh Utara	: 11 insiden (3,5%)
- Lhokseumawe	: 12 insiden (3,8%)
- Aceh Timur	: 20 insiden (6,3%)
- Langsa	: 13 insiden (4,1%)
- Aceh Tamiang	: 8 insiden (2,5%)
- Bener Meriah	: 16 insiden (5,1%)
- Aceh Tengah	: 10 insiden (3,2%)
- Gayo Lues	: 3 insiden (1,0%)
- Aceh Tenggara	: 11 insiden (3,5%)
- Aceh Jaya	: 11 insiden (3,5%)
- Aceh Barat	: 40 insiden (12,7%)

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

- Nagan Raya : 20 insiden (6,3%)
- Aceh Barat Daya : 10 insiden (3,2%)
- Simeulue : 4 insiden (1,3%)
- Aceh Selatan : 6 insiden (1,9%)
- Subulussalam : 9 insiden (2,9%)
- Aceh Singkil : 5 insiden (1,6%)

➢ Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

A. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional

a) Bimbingan Teknis Pelaporan dan Analisis Sikonda peserta 30 orang sebanyak 1 kali di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 26 Februari 2020.

- Pada Bimtek ini mengundang para pejabat/satgas pelapor SIKONDA pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota .
- Pada Bimtek ini diberi tehnik menjaring informasi dari masyarakat, pelaporan dan sistematis dalam pelaporan.
- Narasumber pada Bimtek ini Kaban Kesbangpol Aceh, Kaban Kesbangpol Pidie Jaya, dan Plt. Kabid Penananganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah melakukan bimbingan Teknis pelaporan dan analisis situasi dan kondisi daerah serta potensi-potensi konflik yang terjadi di daerah.
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam perkembangan situasi dan Kondisi daerah.

2) Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing

a) Rapat Rutin Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing peserta 20 orang sebanyak 1 Kegiatan Pada Tanggal 29 September 2020 Ruang Memorial Perdamaian Aceh.

- Rapat Koordinasi mengundang Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Kabinda, Kabid Wasnas, Direktur Intelkam Polda Aceh, Asisten Intelijen Kasdam Iskandar Muda, Asisten

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Intelijen Kajati Aceh, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

- Pada rapat dibahas Isu Keberadaan Orang Asing, Tenaga Keja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing yang berada di Daerah.
- Narasumber pada rapat koordinasi diisi oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh.
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antar instansi terkait pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah.
- Tindak lanjut Memberikan Rekomendasi Kepada Pemerintah Aceh Melalui Badan Kesbangpol Aceh untuk di Ambil Langkah-langkah Tindak Bagi Orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Ilegal yang Berada di Wilayah Aceh.

3) Dialog Forum-forum di Daerah Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional

a) FGD Forum-Forum di Daerah dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional, peserta 20 orang pada Angkatan (1) di Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 09 Maret 2020.

- Kegiatan FGD Forum-forum di Daerah dalam rangka Kewaspadaan Nasional dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan pemecahan permasalahan yang terjadi di daerah serta peningkatan pemahaman forum-forum terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat
- Peserta kegiatan dialog terdiri dari : Unsur FKDM, FKUB, FPK, MAA, MPU, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Ormas dan SKPK terkait
- Narasumber untuk kegiatan adalah Wiratmadinata, SH, MH, (Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama).

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

- Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya dalam pencegahan radikalisme, terorisme, intoleransi dan potensi-potensi konflik lainnya.
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

b) Rapat Rutin FORKOPIMDA

1) Rapat Rutin FORKOPIMDA (1), pada tanggal 17 Maret 2020.
   - Rapat rutin FORKOPIMDA dilaksanakan untuk memperoleh informasi Antisipasi Penaganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan pemecahan permasalahan yang terjadi terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
   - Peserta kegiatan terdiri dari : Unsur Forkopimda Aceh dan Tim Fasilitasi Forkopimda serta lembaga terkait lainnya.
   - Narasumber untuk kegiatan adalah unsur FORKOPIMDA Aceh.
   - Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Stakeholder lainnya dalam antisipasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
   - Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi Penanganan Corona Virus Desease 2019 (covid-19).

2) Rapat Rutin FORKOPIMDA (2), peserta 34 orang pada tanggal 20 Oktober 2020.
   - Rapat rutin FORKOPIMDA dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan pemecahan permasalahan yang terjadi di Aceh terhadap Kisruh MPTT-I serta Penanganan Masalah Pendirian Tempat Ibadah di Kabupaten Aceh Singkil

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

- Peserta kegiatan dialog terdiri dari : Unsur Forkopimda Aceh, Forkopimda Aceh Singkil, FKUB Aceh, FKUB Aceh Singkil, SKPA dan SKPK terkait sebanyak 35 orang.
- Narasumber untuk kegiatan adalah Unsur Forkopimda Aceh dan Forkopimda Aceh Singkil.
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Stakeholder lainnya dalam pencegahan Terjadinya Potensi-potensi Konflik lainnya.
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

3) Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerjasama Intelijen Keamanan

a) Rapat Rutin Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Aceh, peserta 15 orang sebanyak 3 kali di Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2020, 01 April 2020 dan 21 Oktober 2020,

- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- Rapat Rutin dilaksanakan sesuai dengan issu yang berkembang di masyarakat untuk dibahas dan hasilnya akan disampaikan kepada Badan Kesbangpol Aceh selaku yang memfasilitasi.
- Rapat rutin dihadiri oleh Anggota FKDM dan Anggota Sekretariat FKDM Aceh.

B. Program Penanganan Konflik dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Koordinasi Penanganan Konflik

a) FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme, peserta 15 orang pada Angkatan 1 di Kabupaten Pidie pada tanggal 13 Februari 2020.

- Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme dihadiri oleh unsur Polres, Kodim, Kejari, Kemenag, MAA,

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

MPU, FKUB, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan SKPK terkait di Kabupaten Pidie.

- Materi pada kegiatan berupa 1) Potensi Radikalisme dan Upaya Pencegahannya.
- Materi disampaikan oleh Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA (Ketua FKPT Aceh).
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh.

- Kajian Pendidikan Perdamaian melibatkan sejumlah tokoh akademisi yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mendalam terkait pendidikan perdamaian di Aceh.
- Anggota Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2020 terdiri dari Prof. Drs. Yusny Saby, Ma, Ph.D (Guru Besar UIN Ar-Raniry), Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag (Dosen UIN Ar-Raniry), Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA (Dosen UIN Ar-Raniry), Dr. Bustami Abubakar, M.Hum (peneliti), Dr. Sulaiman Tripa, MH (Dosen Unsyiah), Dr. Hafas Furqani (Ekonom), Affan Ramly, M.Ed (Lembaga Adat), Nurullah, MA (Aktifis Perempuan), dan Ahmad Fauzan, MA (Budayawan)
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah Mendapatkan hasil kajian dan tulisan tentang pendidikan perdamaian di Aceh sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun kurikulum dan penguatan perdamaian bagi pelajar di Aceh.

2) Tinjauan Capaian Penanganan Konflik

a) FGD Capaian Penanganan Konflik di Aceh, peserta 15 orang pada angkatan 1 di kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 05 Maret 2020.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

- Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh diikuti oleh unsure Polres, Kodim, Kejari, MAA, MPU, Kemenag, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, FKUB dan SKPK terkait.
- Materi pada kegiatan ini 1) Capaian Penanganan Konflik Aceh.
- Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Univ. Abulyatama.
- Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.
- Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

3) Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh
   - Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya masukan untuk penyempurnaan hasil Kajian Penyelesaian konflik Aceh.

4) Pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh dilaporkan secara periode target B04, B08 dan B12 (April, Agustus dan Desember) sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.

➢ **Isu Yang Menjadi Potensi Konflik Menonjol Tahun 2020**

1. Isu Kebijakan/Politik

Dana Desa

Bahwa hampir semua Kabupaten/Kota di Aceh mengalami permasalahan mengenai dana desa, baik dari tata kelola keuangannya, budaya dan adat istiadat desanya maupun kecenderungan terjadi politik kekuasan antara pemimpin desa dengan warganya. Dengan penambahan jumlah yang makin besar sementara kemampuan mengelola sangat minim, seringkali

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

menimbulkan masalah di lapangan. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan dana desa sebagai sumber dana bantuan keuangan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemic covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) menjadikan permasalahan pengelolaan dana desa menjadi semakin banyak. Masyarakat menginginkan BLT-DD dapat dibagikan kepada seluruh warga, namun aturan telah menetapkan bahwa dana BLT-DD hanya akan diberikan kepada warga yang berhak yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya (PKH, dll). Tidak pahamnya masyarakat terhadap juknis/juklak juga qanun terkait tata cara penggunaan dana desa menyebabkan masyarakat menduga-duga adanya penyimpangan dana desa di desa sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial.

Politik Pemerintahan

Konflik politik ekses dari Pileg dan Pilpres masih akan terjadi, dimana perpecahan di masyarakat dan kalangan elit politik akibat perbedaan pilihan masih ada. Pihak yang merasa pilihannya kalah masih belum puas, sehingga masih terjadi perpecahan dan konflik di masyarakat, terutama di media sosial. Selain itu, pembagian kekuasaan di legislatif juga masih berpotensi terjadi, terutama terkait pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan pemilihan pimpinan dewan.

2. Isu Sosial

Konflik Lahan

Hingga saat ini sejumlah permasalahan terkait konflik lahan masih sering terjadi, terutama di daerah yang banyak terdapat lahan perkebunan milik perusahaan. Tudingan penyerobotan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh warga seringkali sulit diselesaikan dikarenakan kedua belah pihak bertahan dengan asumsi masing-masing. Masing seringnya ditemukan klaim lahan tanpa sertifikat maupun surat-surat yang jelas menyebabkan maraknya terjadi konflik lahan. Selain itu, sejumlah proyek pemerintah juga menyumbangkan potensi konflik lahan terkait proses ganti rugi, dimana warga masyarakat

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

yang lahannya terkena proyek pemerintah merasa keberatan dengan harga ganti rugi lahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Konflik Tambang

Konflik tambang di Aceh sangat merata, baik dari bagian Aceh pesisir, Aceh bagian tengah maupun Aceh bagian selatan. Misalnya pertambangan emas ilegal yang berpotensi konflik di Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Selain tambang emas ilegal, proyek tambang-tambang lainnya seperti tambang batubara dan galian C yang berdampak pada kondusivitas warga serta kerusakan lingkungan sekitar tambang juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Kebijakan terkait perizinan tambang juga masih menonjol, dimana masih terjadi saling tuding antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi terkait siapa yang berhak mengeluarkan izin tambang. Dampak dari eksistensi tambang di Aceh mengakibatkan potensi bencana alam seperti banjir bandang, longsor dan konflik sosial.

3. Isu Ekonomi dan Sosial Budaya

Kemiskinan

Data nasional tentang tingkat kemiskinan nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh bukan lagi menjadi provinsi termiskin di Sumatera, dan kini Bengkulu menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh berdasarkan daerah berdasrkan data tahun 2019 adalah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 107,34 ribu orang, Kabupaten Bireuen 63,60 ribu orang, serta Kabupaten Aceh Timur sebanyak 62,79 ribu orang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena tingginya angka kemiskinan juga akan memberikan pengaruh terhadap angka kriminalitas dan konflik. Meskipun Pemerintah Pusat telah menggulirkan program dana desa dan sejumlah bantuan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, namun kendala dalam pengelolaan seringkali menyebabkan program tidak tepat

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

sasaran, sehingga justru menjadi sumber polemik dan konflik di masyarakat.

Narkoba

Narkoba masih menjadi penyumbang tingginya angka kriminalitas di Aceh. Upaya aparat kepolisian untuk menumpas gembong narkoba di Aceh seringkali mendapat kendala, terutama dengan modus para gembong narkoba menjadi donor bagi sejumlah kegiatan sosial di desa, sehingga keberadaan mereka mendapat perlindungan dari masyarakat. Selain itu, lokasi ladang ganja yang berada di tengah hutan dan pegunungan juga menyebabkan aparat kesulitan untuk mendeteksi dan memusnahkan ladang ganja yang sengaja ditanam. Upaya penyelundupan narkoba terutama jenis sabu-sabu dalam jumlah besar ke Aceh juga masih marak terjadi, dan biasanya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional/kecil yang banyak terdapat di pesisir Aceh.

Kontestasi Organisasi

Berdasarkan bentuk dan jenis konflik tidak lepas dari kontestasi organisasi atau lembaga di dalamnya. Baik organisasi pemerintah, maupun organisasi masyarakat. Misalnya, organisasi KPA/PA memiliki otoritas dalam berbagai persoalan berbasis politik dan dana desa di sejumlah kabupaten/kota. Organisasi seperti perusahaan memiliki kontribusi dalam sejumlah konflik lahan dan tapal batas di daerah-daerah yang memiliki perkebunan di Aceh. Organisasi Dayah dan keagamaan memiliki kontribusi dalam kontestasi intra agama, seperti kemelut pengajian Tastafi, MTPP, dan kepengurusan mesjid. Begitu juga dengan FPI memiliki kontribusi dalam setiap kontestasi konflik yang ada berbasis agama, seperti yang terjadi di daerah perbatasan

- **Upaya Penanganan dan Kendala**

A. Upaya Penanganan konflik yang dilakukan:

1. Pencegahan oleh Badan Kesbangpol Aceh berupa kegiatan :
   a) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh;
   b) Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing;

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

c) Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
d) Pembentukan Tim Satgas Pelaporan Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah di Kabupaten/Kota;
e) Pembentukan Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh;
f) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
g) Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial;
h) FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik;
i) Dialog Capaian Penanganan Konflik;
j) FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme;
k) Edukasi Pencegahan Paham Radikal Bagi Pelajar;
l) Renungan dan Edukasi Perdamaian Bagi Pelajar;
m) FGD Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh;
n) Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
o) Dialog Forum-Forum di Daerah Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional;
p) FGD Forum-Forum Masyarakat Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional;
q) Kajian Analisis Situasi Kondisi Daerah;
r) Monitoring dan Evaluasi.

2. Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan serangkaian kegiatan dalam penanganan permasalahan lahan antara perusahaan dengan masyarakat, diantaranya melakukan mediasi dan koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan permasalahan lahan di Aceh. Setiap permasalahan yang telah diselesaikan dilakukan ekspose dengan memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kesepakatan antar pihak.

3. Upaya yang sudah dilakukan terkait klaim wilayah yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara terhadap wilayah Aceh adalah melalui pembicaraan antara Pemerintah Aceh dengan Pemprov Sumut terkait klaim tersebut, dan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan menunjukkan bukti-

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

bukti agraria bahwa derah tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Selain itu dilakukan juga pemasangan patok tapal batas antar provinsi di wilayah yang rawan konflik tapal batas. Upaya ini telah berhasil dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait tapal batas antara Aceh dengan Sumatera Utara.

4. Beberapa kasus demonstrasi yang melibatkan jumlah massa besar dapat ditangani oleh aparat keamanan dengan melakukan pengamanan sehingga tidak terjadi aksi anarkis.

5. Konflik politik yang terjadi di internal Parpol diselesaikan melalui kebijakan internal parpol, dan melalui jalur hukum.

6. Secara umum, selama tahun 2020 capaian penanganan potensi konflik yang telah dilakukan mencapai 96,16 persen, dimana hampir semua insiden potensi konflik dapat ditangani, baik oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota), aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.

B. Kendala yang dihadapi selama tahun 2020 adalah adanya refocusing anggaran yang menyebabkan sejumlah kegiatan tidak dapat terlaksana, sehingga program-program pencegahan konflik yang sudah disusun tidak dapat secara maksimal dilaksanakan. Namun secara umum upaya penanganan potensi konflik tetap berjalan berkat komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat keamanan.

LKI 2020
KESBANGPOL ACEH

3.4.1.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II

Tabel 3.9
Analisis Tingkat Efesiensi Berdasarkan Anggaran
Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
							ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	**Persentase potensi konflik yang tertangani**	**97,54%**	**97,77%**	**100,24**	**B.**	**Program Penanganan Konflik**	**141.667.747**	**139.516.550**	**98,48**	**1,75**
					a.	Penanganan Potensi Konflik	107.110.067	106.593.800	**99,52**	**0,72**
					b.	Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh	34.557.680	32.922.750	**95,27**	**4,97**
					c.	Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh	0	0	**0,00**	**0,00**

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Berdasarkan Tabel 3.9 secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mempunyai range nilai yang besar antara capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98,48% sehingga tingkat efisiensi anggaran hanya sebesar 1,52% Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap capaian kinerja, diantaranya proses pencegahan dengan mendorong instansi terkait dan masyarakat dalam proses penanganan potensi konflik dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Aceh menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian Capaian Kinerja sesuai target pada Perjanjian Kerja sedangkan terjadinya wabah COVID-19 menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian Capaian Kinerja yang menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran. Adapun beberapa sampel potensi konflik yang terjadi berikut dengan capaian penanganannya selama tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Sampel Potensi Konflik dan Capaian Penanganannya

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Kebijakan	Kamis (2/1), Ratusan tenaga honor RSUD dr Fauziah Bireuen melakukan pertemuan dengan pimpinan RSUD guna mempertanyakan honor mereka yang belum dibayarkan hampir 2 tahun. Para tenaga honor terdiri dari Satpam, perawat, dan pegawai lainnya. Para tenaga honor RSUD melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Bireuen untuk menyampaikan aspirasi.	Pimpinan RSUD menemui para tenaga honorer dan menjelaskan bahwa tenaga honorer tidak akan menerima honor, melainkan remunerasi Ketua DPRK Bireuen berjanji akan mengupayakan agar jerih payah tenaga honor diusulkan dalam APBK Perubahan Tahun 2020
	Konflik Industrial	Sabtu (4/1), Sejumlah pemuda Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya menghadang mobil trado yang membawa material proyek PLTU 3-4. Penghadangan dilakukan mulai pukul 02.00 WIB ketika 9 mobil trado yang membawa tiang pancang dari Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya memasuki kompleks PLTU 3-4 di Suak Puntong Nagan Raya. Aksi penghadangan itu dilancarkan untuk menuntut kejelasan terkait distribusi untuk desa yang tidak direalisasikan yakni Rp 100 ribu per truk.	Dilakukan musyawarah antara aparat desa, TNI/Polri dan perwakilan pemuda, namun tidak dihadiri pihak perusahaan Warga sudah mengizinkan dilakukan bongkar muat
	Kriminal Bersenjata Api	Minggu (5/1), Seorang wartawan Tabloid MODUS Aceh di Aceh Barat, Aidil Firmansyah melaporkan seorang pimpinan perusahaan a.n Akrim, karena telah mengancam tembak korban di salah satu warkop di Desa Suak Ribee, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat. Korban menduga pengancaman tersebut terkait dengan berita tentang penghadangan mobil trado pengangkut tiang pancang yang ditulis korban.	Kasusnya ditangani Polres Aceh Barat Pelaku diamankan Polres Aceh Barat
	Konflik Politik	Senin (6/1), Empat dari sembilan fraksi di DPRA memboikot rapat penetapan Alat Kelengkapan Desan (AKD). Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA. Keempat fraksi ini tidak bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II pimpinan Muzakir Manaf alias Mualem. Akibat ketidakhadiran keempat fraksi tersebut rapat terpaksa dibatalkan	Rapat ditunda ke Selasa Seluruh fraksi sepakat dilakukan kocok ulang anggota AKD

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Sumberdaya	Selasa (7/1), Satreskrim Polres Pidie menggerebek lokasi tambang emas ilegal di aliran Sungai Alue Saya, Kecamatan Tangse, Pidie dan mengamankan sepuluh warga pekerja dan operasional beko. Dari 10 warga yang diamankan satu warga Lhokseumawe, satu warga Aceh Utara dan selebihnya warga Pidie. Polisi juga mengamankan MN bin A (48) warga Gp Baro, Tangse yang diduga sebagai orang yang mendanai aktivitas tambang emas ilegal tersebut	Para pelaku dan barang bukti diamankan Polres Pidie
	Konflik Industrial	Sabtu (1/2), Para pekerja PT Mopoli, perusahaan perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit, di Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat menggelar unjukrasa dan mogok kerja menuntut tunggakan gaji selama 3 bulan yang belum dibayarkan. Total, ada 625 pekerja yang belum menerima hak bulanannya.	Massa ditemui anggota komisi V DPRA Tarmizi
	Konflik Politik	Senin (3/2), Pelantikan Pj Keuchik Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat sempat di warnai insiden keributan dengan pemecahan kaca jendela dan pintu saat berlangsungnya pembacaan SK pelantikan Pj keuchik yang baru di Kantor Camat Woyla Barat. Aksi tersebut dipicu oleh pihak keuchik yang lama, lantaran tidak terima Abdul Salam diberhentikan dari jabatan Pj Keuchik di desa tesebut tanpa ada sebab dan pemberitahuan.	Aparat Polsek dan Koramil mengamankan lokasi Camat tetap melantik Pj Keuchik
	Konflik Lahan	Selasa (4/2), Warga pemilik lahan yang terkena proyek Waduk Rukoh di Kecamatan Titeu mendatangi Kantor BPN Pidie mempertanyakan ganti rugi lahan yang belum dibayarkan. Padahal, lahan untuk pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Waduk Rukoh telah diukur BPN	Warga diterima Kepala BPN dan menjelaskan bahwa ganti rugi tidak bisa dilakukan sekaligus, tapi bertahap secara parsial
	Kriminal Bersenjata Api	Kamis (13/2), Aparat Polres Bireuen menangkap 2 orang warga Peusangan, Bireuen berinisial Ef bin M Al alias Koboy (52) warga Desa Pante Ara dan Mur bin Hs (38) warga Desa Pante Piyeu, Peusangan Bireuen karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Petugas mengamankan barang bukti 128 paket narkotika jenis sabu seberat 19.30 gram, Hp, senapan angin laras panjang dan laras pendek, 1 unit pistol jenis FN, 2 pucuk air softgun, 147 amunisi AK, 18 amunisi SS1, 11 amunisi Ref, 6 amunisi FN dan alat hisab sabu. Satu pelaku lainnya berhasil kabur dan menjadi DPO	Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Bireuen
	Konflik Politik	Minggu (16/2), Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Aceh (PA), Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Hotel Tiara sempat terjadi ketegangan antar sesama anggota PA dan KPA Aceh Barat. Sejumlah massa menghadang petinggi PA yang akan memasuki lokasi Muswil menggunakan rantis Baracuda Brimob. Massa yang menghadang mengaku kecewa karena tidak diundang dalam Muswil	Kegiatan Muswil mendapat pengamanan dari Polres Aceh Barat Polisi juga mengamankan salah seorang peserta Muswil yang kedapatan membawa sajam jenis keris
	Konflik Kebijakan	Senin (2/3), Keberadaan fasilitas olahraga bilyar di Kota Langsa yang diresmikan ketua KONI Kota Langsa menimbulkan polemik di masyarakat Kota Langsa. Sejumlah pihak menuding fasilitas tersebut melanggar syariat Islam. MPU Kota Langsa juga mengirimkan surat ke DSI Langsa meminta agar fasilitas bilyar ditutup	POBSI Kota Langsa menyatakan bahwa fasilitas bilyar sebagai pusat pelatihan resmi olahraga bilyar yang legal, bukan arena judi

KESBANGPOL ACEH 2020

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Kriminal Bersenjata	Selasa (3/3), Sat Resnarkoba Polres Pidie menangkap pria berinisial Yus alias Sitong (30) di Gampong Melayu, Kecamatan Indra Jaya. Polisi mengamankan barang bukti senjata api laras pendek bersama magazin dan 5 butir peluru kaliber 45, 2 batang rokok berisi ganja, serta alat hisap sabu.	Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Pidie
	Teror	Selasa (10/3), 2 unit sepeda motor milik Rahman Sani, warga Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur dibakar OTK saat ia dan keluarganya tertidur. Di TKP ditemukan satu jeriken dan mancis yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membakar kenderaan sepeda motor	Kasusnya ditangani Polsek Simeulue Timur
	Konflik Kebijakan	Kamis (12/3), Sejumlah mahasiswa dan pihak Rektorat UIN Ar-Raniry memprotes tindakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, yang menyita alat Islamic Jammer temuan mahasiswa UIN. Islamic Jammer ini merupakan alat hasil inovasi mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berfungsi meredam sinyal handphone dalam masjid selama shalat jamaah berlangsung. Inovasi ini ditemukan oleh beberapa mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan berhasil meraih medali emas dalam penghargaan tingkat internasional	Pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh akhirnya mengembalikan alat Islamic Jammer ke UIN
	Konflik Sumberdaya	Senin (23/3), Beredar informasi adanya larangan masuk gula dari Sumut ke Aceh oleh Polda Sumut sehingga menyebabkan naiknya harga gula pasir di sejumlah daerah di Aceh.	Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan Polda Sumut
	Konflik Kebijakan	Kamis (2/4), Sejumlah pedagang mengeluhkan tindakan represif dari aparat keamanan saat menertibkan pedagang yang tetap berjualan saat penerapan jam malam dan pencegahan keramaian di Banda Aceh. Para pedagang menilai tindakan aparat seperti masa konflik. Para pedagang berharap jam malam segera dicabut agar mereka dapat kembali berjualan dengan normal	Pemerintah Aceh mencabut penerapan jam malam
	Konflik Batas Daerah	Minggu (5/4), Jembatan darurat yang digunakan 560 warga Gampong Pusong, Kecamatan Kembang Tanjong dibakar oleh sekelompok orang yang diduga dilakukan oleh warga Gp Lancok, Kec. Bandar Baru. Pembakaran jembatan darurat diduga ekses konflik tapal batas antar desa	Muspika bersama aparat TNI/Polri turun ke lokasi untuk menghindari bentrok antar warga Pemkab Pidie surati Pemerintah Aceh meminta bantuan penyelesaian sengketa tapal batas
	Konflik SARA	Kamis (9/4), Sejumlah pemuda Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat melaporkan pemilik akun youtube Endatu Project ke Polres Aceh Barat karena dinilai telah melecehkan warga Aceh Barat dengan postingan video berjudul "Nyan Meulaboh". Di dalam video dinarasikan sejumlah hal yang tidak baik dan terkesan menghina orang Meulaboh.	Polres Aceh Barat akan memediasi kasus ini Kasusnya diselesaikan secara adat

KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Kriminal Bersenjata Api	Senin (20/4), Aparat Polres Bireuen mengamankan satu senjata api jenis S&W revolver keluaran USA nomor BET3698 MDD686-3 serta tiga butir amunisi Revolver, satu butir amunisi Ces, ditambah 12 butir amunisi FN dan satu borgol logo Polri di rumah salah satu warga Desa Lhung Keube, Samalanga, Bireuen. Pemilik senpi yang bersinial S berhasil melarikan diri dan menjadi DPO Polres Bireuen.	Dilakukan pengejaran terhadap pelaku, barang bukti diamankan di Mapolres Bireuen
	Konflik Kebijakan	Rabu (22/4), Sejumlah penerima zakat fakir miskin di Desa Aron Tunong, Kec. Woyla, Aceh Barat mengaku dipaksa menyerahkan uang kepada oknum pengurus Baitul Mal Desa sebesar Rp 25 ribu-Rp 50 ribu per orang. Kutipan itu dinilai ilegal karena tidak jelas peruntukannya untuk apa. Para penerima zakat didatangi oleh oknum pengurus baitul mal desa setelah mereka pulang menerima zakat di kecamatan.	Kasusnya sudah dilaporkan ke Bupati Aceh Barat Baitul Mal Kab. Aceh Barat meminta para oknum dipecat dari jabatan pengurus baitul mal desa
	Konflik Kebijakan	Selasa (5/5), Warga Gampong Jambo Labu, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur resah dengan kedatangan sejumlah pekerja di areal hutan yang dikelola Koperasi Produsen Sinar Maju karena para pekerja tersebut diketahui kebanyakan berasal dari Sumut. Warga khawatir para pekerja dapat menularkan virus corona karena berasal dari zona merah penyebaran corona. Aparat desa bahkan meminta perusahaan segera menghentikan operasional dan memulangkan para pekerja yang berasal dari luar Aceh	Aparat desa meminta tim Gugus Tugas Penanganan Covid-29 Kab. Aceh Timur memeriksa kesehatan para pekerja
	Teror	Selasa (5/5), Sebuah mobil truk bermuatan TBS dihadang dan dibakar oleh oknum warga berinisial M di jalan Peureulak-Peunaron, Dusun Sikabot, Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur. Pembakaran diduga karena pelaku marah tidak diberi pekerjaan oleh toke sawit	Kasusnya ditangani Polres Aceh Timur Pelaku diamankan polisi
	Konflik Politik	Rabu (13/5), Bupati Aceh Tengah mendapat ancaman bunuh dari Wakil Bupati saat sedang berada di Pendopo Bupati Aceh Tengah. Wakil Bupati dilaporkan tiba-tiba masuk ke pendopo saat Bupati sedang rapat dengan sejumlah kepala dinas membicarakan penanganan banjir. Diduga ancaman dari Wakil Bupati terkait pembagian pengelolaan proyek 17 M di Pemkab Aceh Tengah	Bupati membuat laporan ke Polres Aceh Tengah Plt Gubernur Aceh mempertemukan kedua pihak yang bertikai untuk didamaikan Kedua pihak sepakat berdamai dan menandatangani kesepakatan damai dalam rapat paripurna DPRK
	Konflik Kebijakan	Jum'at (15/5), Ratusan warga Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 18.00 WIB melakukan aksi demo ke kantor Keuchik setempat dipicu oleh persoalan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dinilai tidak tepat sasaran. Aksi warga berujung perusakan dan penyegelan kantor Keuchik	Polres Aceh Selatan melakukan mediasi antara warga dengan aparat desa

KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Kebijakan	Rabu (20/5), Puluhan warga Gampong Pasie Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur melakukan aksi unjukrasa dan sempat memblokir badan jalan nasional Banda Aceh – Medan. Aksi warga merupakan bentuk protes kepada Bupati Aceh Selatan dan Kadis terkait agar segera turun ke wilayah mereka yang terkena abrasi Pantai Seubadeh.	Muspika Bakongan Timur turun ke lokasi untuk menemui warga dan meminta blokir jalan dibuka Plt Bupati Aceh Selatan telah turun melihat lokasi abrasi dan menyampaikan bahwa usulan pembangunan breakwater telah diusulkan ke provinsi untuk T.A 2021
	Konflik Kebijakan	Senin (1/6), Puluhan masyarakat Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah mengamuk dan memecahkan kaca Kantor Reje Kampung setempat saat melakukan aksi protes bantuan terkait bantuan program ketahanan pangan dan BLT yang bersumber dari dana desa. Hal tersebut dipicu akibat Reje Kampung yang dinilai masyarakat tidak bisa menjelaskan terkait bantuan yang bersumber dari dana desa.	Camat turun ke lokasi dan menenangkan massa serta memediasi Polisi mengamankan terduga pelaku perusakan
	Konflik Kebijakan	Selasa (2/6), Puluhan warga Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat menggelar demonstrasi menuntut transaparansi penggunaan dana desa di kantor Keuchik Gp Kuala. Karena hanya ditemui beberapa perangkat desa dan tidak ada keuchik, maka warga kemudian mengadu ke DPRK Langsa. Warga menuding Keuchik terkesan tidak transparan dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan dana desa.	Warga diterima Ketua dan anggota DPRK Langsa, dan berjanji akan segera memanggil Keuchik dan perangkat gampong untuk klarifikasi
	Teror	Rabu (3/6), Sepda motor dinas milik Keuchik Arongan Lise, Kec. Baktiya, Aceh Utara dibakar oleh OTK. Belum diketahui pelaku dan motif pembakaran kendaraan dinas keuchik	Kasusnya ditangani Polsek Baktiya
	Konflik Kebijakan	Jum'at (5/6), Viral tentang kondisi ternak sapi di UPTD IKP Saree yang kondisinya kurus dan memprihatinkan. Diduga ternak sapi dibiarkan kelaparan dan tak dirawat. Yaysan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melaporkan kondisi ini ke Polda Aceh sebagai tindakan penganiayaan terhadap hewan, dengan terlapor Kepala UPTD IKP Saree, Zulfadli	Kadis Peternakan Aceh memerintahkan Kepala UPTD dan seluruh staf memperbaiki kondisi peternakan sapi Plt Gubernur Aceh meninjau UPTD dan memerintahkan seluruh sapi di lepas di padang penggembalaan
	Teror	Senin (8/6), Rumah Anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani dari Partai Gerindra di Desa Alue Perman, Kecamatan Woyla Barat digranat orang tak dikenal (OTK) sekitar pukul 03.30 WIB. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, karena granat tersebut hanya dilempar di depan rumah korban dan hanya memecahkan kaca jendela	Kasusnya ditangani Polres Aceh Barat
	Konflik Kebijakan	Minggu (5/7), Warga Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil mengadu ke Camat karena hingga kini dana BLT DD belum disalurkan kepada warga desa mereka meskipun dana tersebut sudah ditransfer ke rekening desa. Belum diketahui penyebab Kepala Desa enggan menyalurkan dan BLT tersebut	Camat sudah memanggil Kepala Desa, namun belum direspon Camat berjanji akan segera menyalurkan dana BPT DD setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir

KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Kebijakan	Selasa (14/7), Puluhan mahasiswa Universitas Malikussaleh melakukan aksi demo di depan kampus Buket Indah, Kec. Muara Satu menuntut pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) 50 persen secara menyeluruh bagi seluruh mahasiswa. Mahasiswa juga sempat membakar ban bekas dan berorasi serta memblokir akses jalan masuk kampus menggunakan sepeda motor	Rektor Unimal menemui dan beraudiensi dengan mahasiswa
	Konflik Kebijakan	Rabu (15/7), Satu keluarga dari Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar mengambil paksa jenazah ayah mereka yang meninggal di RSUZA untuk dimakamkan sendiri secara normal, padahal pasien yang berinisial MI (63) itu terkonfirmasi positif Covid-19. Pihak keluarga pasien mengancam dan memaksa petugas untuk membawa jenazah tanpa prosedur pemulasaran jenazah covid	Kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian MPU Aceh mengeluarkan fatwa Tajhiz jenazah di RSUZA sesuai syariat Islam
	Bentrok Massa	Kamis (16/7), Puluhan remaja dari 2 kelompok terlibat tawuran di Lapangan Gelanggang, Darussalam, Kec. Syiah Kuala. Dalam tawuran yang melibatkan 2 kelompok yakni Glemory Solidarity Xtraordinary (GSX) dengan Anak Asrama Kota Alam (Askota) tersebut menggunakan senjata tajam, mulai pisau, double stick, topeng, serta kayu-kayu. Diduga penyebab tawuran karena permasalah pribadi	11 pelaku tawuran diamankan polisi
	Konflik Sumberdaya	Jum'at (24/7), Aparat Polres Aceh jaya mengamankan 100 kubik kayu olahan yang diduga hasil pembalakan liar di dalam hutan lindung kawasan Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya. Polisi juga mengamankan 1 unit alat berat jenis doser dan alat pemotong kayu	Barang bukti diamankan di Mapolres Aceh Jaya
	Konflik Kebijakan	Minggu (2/8), Seorang pasien positif covid-19 yang menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Jiwa Meulaboh dilaporkan mengamuk karena kebutuhan makan dan air bersih tidak terpenuhi	Dinkes Aceh Barat menyatakan telah mengupayakan memenuhi kebutuhan pasien isolasi
	Kriminal	Senin (3/8), Seorang pemuda inisial JS (23) warga Kampung Bengkelang, Bandarpusaka, Aceh Tamiang ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pembakaran terhadap kantor Afdelling VII dan rumah sekuriti PTPN I di Kampung Bengkelang. Aksi pembakaran dipicu karena pelaku kesal aksinya mencuri buah sawit dipergoki securiti	Pelaku diamankan di Mapolres Aceh Tamiang
	Konflik Kebijakan	Sabtu (8/8), Sejumlah pihak meminta Pemerintah Aceh dan DPRA meninjau ulang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang dinilai menyulitkan masyarakat, terutama pelaku usaha, disebabkan dengan dialihkannya operasional bank konvensional kepada syariah menyebabkan masyarakat kesulitan bertransaksi, disebabkan sejumlah fasilitas perbankan yang biasanya sudah tersedia di bank konvensional, belum tersedia di bank syariah	Pemerintah Aceh tetap menjalankan Qanun LKS sebagai penerapan syariat Islam di Aceh
	Konflik Lahan	Rabu (12/8), Pembangunan jalan tol seksi IV Blang Bintang-Indrapuri sepanjang 14 Km masih terkendala permasalahan ganti rugi lahan milik warga, karena masih ada warga yang menolak besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah	Uang ganti rugi lahan sudah dititipkan ke PN Jantho sebesar Rp 539 juta

KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Sumberdaya	Selasa (18/8), Sejumlah warga Krueng Geukueh menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Budjang Salim, pusat Kota Krueng Guekuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara memprotes desa mereka yang sering dijadikan lahan pembuangan sampah oleh warga dari desa lain.	Pemerintah desa sepakat menganggarkan dana untuk pembelian 2 unit kendaraan pengangkut sampah
	Anarkis	Jum'at (4/9), Sejumlah warga Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil mendatangi Kantor PLN di Pulau Balai, Kec. Pulau Banyak dan diduga melakukan aksi pelemparan Kantor PLN. Aksi dipicu kekesalan warga karena suplay listrik yang sering terganggu (mati lampu) di desa mereka. Aksi pelemparan menyebabkan sejumlah kaca jendela kantor pecah dan seorang personil Polsek Pulau Banyak menderita luka akibat terkena batu.	Kasusnya sudah ditangani Polsek Pulau Banyak Korban luka dilarikan ke Puskesmas untuk mendapat perawatan Muspika Pulau Banyak memediasi antara warga dengan pihak PLN
	Konflik Politik	Kamis (10/9), 58 dari 81 orang anggota DPRA menandatangani draft usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh guna mempertanyakan kebijakan Pemerintah Aceh terhadap sejumlah isu. Sejumlah isu yang mendasari siajukannya hak interpelasi diantaranya terkait penggunaan dana refocusing covid-19, pemasangan stiker BBM, penggunaan Penasihat Khusus (Pensus) hingga seringnya Plt Gubernur tidak hasir dalam rapat paripurna DPRA.	Plt Gubernur Aceh sudah memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan anggota DPRA melalui forum rapat paripurna
	konflik Kebijakan	Selasa (15/9), Masyarakat Kota Langsa resah karena kebijakan RSUD Langsa yang menutup operasional IGD RSUD dan menolak pasien disebabkan penuhnya semua ruang perawatan untuk melayani pasien dengan gejala covid-19. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan	Walikota Langsa memastikan pelayanan IGD akan tetap dibuka Pemko Langsa mengaktifkan 16 kamar perawatan di Puskesmas Langsa Timur untuk penanganan pasien RSUD
	Konflik Kebijakan	Jum'at (18/9), Tim Gabungan Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, TNI dan Polri merazia dan mengamankan 20 ponsel milik pengungsi Rohingya yang berada di penampungan BLK Lhokseumawe. Petugas menduga salah seorang pengungsi Rohingya terlibat jaringan perdagangan orang dengan tujuan membawa lari pengungsi Rohingya ke Malaysia. Sejumlah pengungsi sempat menolak menyerahkan ponsel miliknya dan berdebat dengan petugas	Seorang pengungsi a.n Mahmud Mizan (23) diamankan ke Kantor Imigrasi Klas II Lhokseumawe
	Konlfik Sumberdaya	Senin (21/9), Aparat Polres Aceh Tamiang mengamankan 5 unit alat berat jenis beco di sejumlah lokasi galian C ilegal di kawasan Kec. Tenggulun, Aceh Tamiang. Operasi penertiban dilakukan untuk menertibkan lokasi galian C tanpa izin yang marak di Aceh Tamiang menskipun sudah pernah ditertibkan pada Agustus lalu	Alat berat diamankan di Mapolres Aceh Tamiang
	Konflik Kebijakan	Jum'at (2/10), Keuchik Desa Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat melaporkan salah seorang warganya a.n Rusdi N ke Polisi karena doduga telah melakukan pencemaran nama baik terkait tudingan Keuchik menyelewengkan dana BLT, karena jumlah penerima BLT di desa tersebut sangat sedikit, hanya 5 orang. Tudingan dilontarkan pelaku dalam rapat dengan Muspika Samatiga	Muspika Samatiga melakukan mediasi antara Keuchik dengan warga yang bersangkutan, dan sudah dicapai perdamaian secara kekeluargaan

KESBANGPOL ACEH

NO	K A S U S	POTENSI KONFLIK	UPAYA PENANGANAN KONFLIK
1	2	3	4
	Konflik Sumberdaya	Senin (5/10), Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan seorang warga Kampung Bandarkhalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang yang diduga telah melakukan praktek pengeboran minyak ilegal di desanya. Polisi juga menutup lokasi ladang minyak ilegal dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa jerigen dan 2 tandon besar berisi minyak mentah	Pelaku diamankan di Mapolres Aceh Tamiang
	Konflik Sumberdaya	Rabu (7/10), Pemkab Nagan Raya memutuskan akan membekukan sementara izin operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kharisma Iskandar Muda (KIM) terkait kasus dugaan pencemafran lingkungan dari limbah perusahaan. Keputusan pembekuan izin sementara berdasarkan rekomendasi DLHK Aceh atas temuan pencemaran limbah PKS di kawasan tersebut.	PKS PT KIM menyatakan sudah memperbaiki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembuatan kolam limbah dan jaringan pipa sirkulasi
	Konflik Industrial	Jum'at (9/10), Sejumlah pekerja PT Mopoli Raya melakukan aksi penyegelan kantor administrasi Perkebunan Unit I di Desa Baro Paya, Kecamatan Panton Reu, dan Kantor PKS serta Perkebunan Unit II di Desa Alue Kuyun, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat karena upahnya belum dibayarkan perusahaan sejak Juli 2020. Tindakan penyegelan dilakukan karyawan karena perusahaan dinilai tidak membuka ruang komunikasi dengan karyawan	Disnaker Aceh Barat akan melakukan mediasi antara perusahaan dengan karyawan
	Konflik Kebijakan	Sabtu (17/10), Keluarga pasien meninggal positif covid-19 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berinisial SD menolak jenazah dilakukan pemulasaran dan pemakaman dengan protokol covid-19 oleh petugas	Petugas menyerahkan penanganan kepada keluarga untuk mencegah keributan, kasusnya sudah dilaporkan ke Satgas Covid Bener Meriah
	Konflik Kebijakan	Selasa (3/11), Belasan kontraktor lokal di lingkungan PT Perta Arun Gas (PAG) mendatangi Gedung DPRK Lhokseumawe mengeluhkan tentang persyaratan lelang yang dirasa memberatkan kontraktor lokal. Salah satu syarat yang dinilai memberatkan adalah adanya kebijakan perusahaan harus menggunakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sementara akuntan yang terdaftar di OJK hanya terdapat di Kota Medan.	Pengusaha ditemui Ketua dan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe DPRK akan memanggil PT PAG dan dilakukan mediasi dengan para kontraktor lokal
	Konflik kebijakan	Senin (9/11), Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) melancarkan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Gubernur Aceh dan DPRA. Buruh meminta Presiden membatalkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).	Aksi buruh mendapat pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP Buruh ditemui Asisten II Setda Aceh
	Konflik Kebijakan	Rabu (11/11), 16 Datok Penghulu (Keuchik) di Kec. Karangbaru, Aceh Tamiang menemui Bupati Aceh Tamiang dan meminta pemerintah segera mengaktifkan proses belajar tatap muka di sekolah, karena proses belajar daring dinilai tidak efektif , dan malah menyebabkan para pelajar kecanduan gadget.	Bupati menemui para Datok Penghulu dan berjanji akan melihat kondisi pandemi untuk membuka sekolah kembali

KESBANGPOL ACEH

1	2	3	4
	Konflik Kebijakan	Senin (16/11), Sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Syari'at Islam, berunjuk rasa ke Balai Kota Banda Aceh mendesak Pemko Banda Aceh mencabut izin hotel yang terlibat dan terbukti menyediakan tempat maksiat, sehingga menciderai penerapan syariat Islam	Para pendemo ditemui Sisiten I Setdako Banda Aceh Aksi demo mendapat pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP
	Konflik Kebijakan	Sabtu (21/11), Tim Peucrok-19 Pidie terdiri dari Polres Pidie, TNI dan Satpol-PP Pidie membubarkan kegiatan penobatan putra-putri duta wisata di salah cafe di Sigli yang digelar oleh Disparbudpora Kab. Pidie. Penobatan putra-putri duta wisata 2020 tidak dilaporkan dan tidak memiliki izin dari polisi	Polres Pidie tidak mengeluarkan izin kegiatan yang mengundang kerumunan orang
	Konflik Kebijakan	Kamis (3/12), Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Aceh, Safaruddin melayangkan gugatan kepada Bank Mandiri, BCA, dan BRI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dengan kebijakan Bank Mandiri, BCA, dan BRI yang akan menutup seluruh operasional konvensionalnya di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai menyebabkan masyarakat Aceh yang menjadi Nasabah Bank Mandiri, BCA dan BRI konvensional akan mendapat kendala jika ingin melakukan kegiatan perbankan dan mengakses fasilitas perbankan lainnya.	Gugatan ditangani PN Jakarta Pusat
	Konflik Kebijakan	Kamis (3/12), 15 orang ASN Pemkab Pidie dan sejumlah orang yang dinilai mampu dilaporkan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Pidie.	Dinas Sosial Pidie mengeluarga para ASN dan orang mampu dari daftar nama penerima bansos
	Konflik Kebijakan	Kamis (10/12), Pegawai kontrak daerah Kabupaten Simeulue menggelar aksi demo ke Gedung DPRK Simeulue menuntut agar gaji mereka yang pembayarannya tertunda sejak Oktober 2020 segera dibayarkan. Penyebab tertundanya pembayaran gaji pegawai honorer karena DPRK tidak membahas anggaran perubahan 2020	Aksi massa mendapat pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP
	Konflik Kebijakan	Selasa (15/12), Belasan pemuda yang tergabung dalam Petani Kopi Menggugat (PKM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah dalam rangka mendesak keseriusan dewan, untuk memperjuangkan Qanun Kopi. Para pemuda juga sempat membawa keranda yang terbuat dari bambu dan kain putih, serta karton bertuliskan seperti “Jangan katakan kalian wakil rakyat kalau tidak peduli dengan kepentingan rakyat” dan juga tulisan “Harga Kopi Rp 5.000 Negara Agraris yang Ironis” saat mendatangi gedung DPRK	Para pemuda diterima Ketua DPRK bersama wakil ketua dan sejumlah anggota DPRK Bener Meriah DPRK sudah membahas draft Qanun yang diajukan Pemkab

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4.1.7. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis III: Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)) adalah indikator komposit yang menjukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur bedasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak hak politik (*political Rights*) dan Lembaga Lembaga demokrasi (*institution of Democrasy*). Metodologi perhitungan IDI mengunakan 4 sumber data yaitu:

1. Review surat kabar lokal;
2. Review dokumen (perda, pergub, dll);
3. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
4. Wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Aceh mencapai angka 78,00 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 79,97. Capaian kinerja demokrasi Prov. Aceh tersebut masih berada pada kategori "sedang". Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

Tabel 3.11
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aceh
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	Capaian RPJMA 2020 (%)
			Target	Realisasi	tingkat capaian (%)		
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	79,97	73,16	78,00	106,61	73,89	105,56

Perubahan angka indeks demokrasi Indonesia (IDI) provinsi Aceh dari tahun 2018-2019 dipengaruhi oleh 3 aspek demokrasi.

1) Kebebasan Sipil yang turun 3,51 poin (dari 96,79 menjadi 93,28);
2) Hak-Hak Politik turun 2,87 poin (dari 68,09 menjadi 65,22); dan
3) Lembaga Demokrasi yang meningkat 1,41 poin (dari 77,67 menjadi 79,08).

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi dalam kurun waktu 1 Tahun. Adapun perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aceh yang dimulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :

Grafik:3.1
Perkembangan IDI Provinsi Aceh 2009-2019

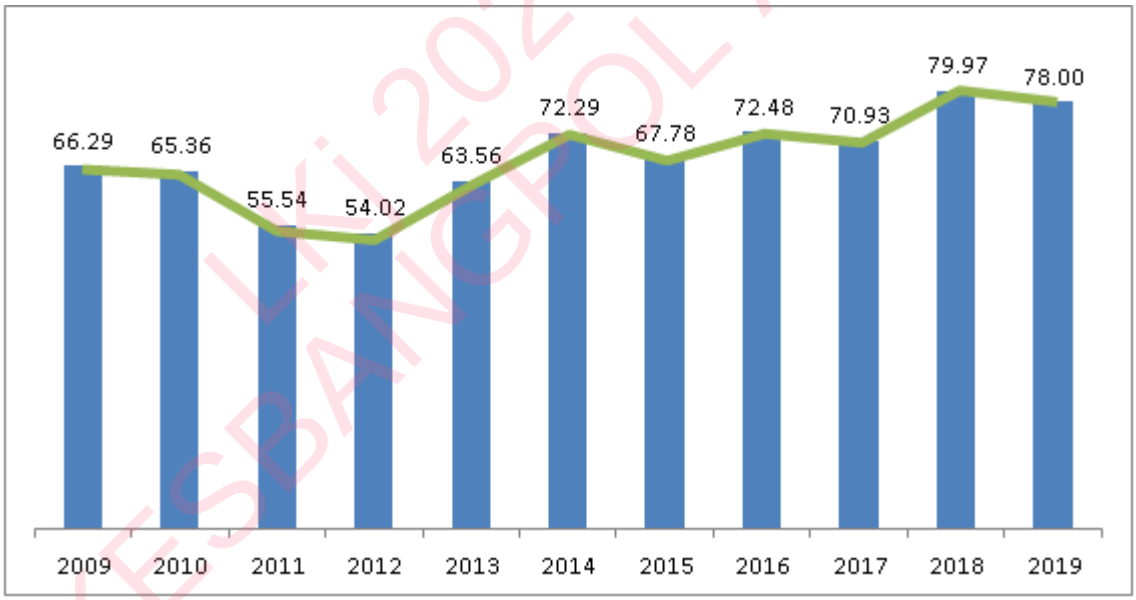

Sumber : BPS Aceh

Rapat pokja indeks demokrasi indonesi, B. Aceh 09 September 2020

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

Angka IDI 2018 Provinsi Aceh merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan Sipil yang bernilai 93,28; aspek hak hak politik yang bernilai 65,22 dan aspek Lembaga demokrasi yang bernilai 79,08, dijabarkan pada grafik berikut ini :

Grafik:3.2
Perkembangan Indeks IDI Aspek provinsi Aceh 2009-2019

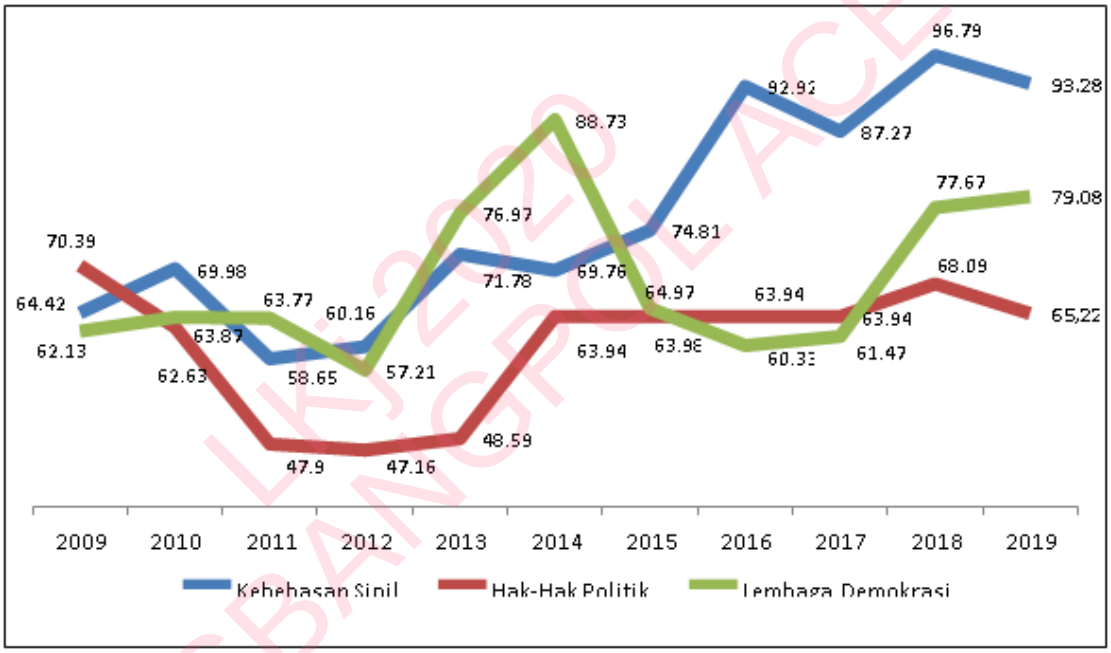

Pada tahun 2019, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, kecuali aspek lembaga demokrasi. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai indeksnya terendah dibanding aspek lainnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 3,51 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 2,87 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin.

Serupa dengan tahun 2018, pada tahun 2019 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Pada tahun 2019 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan enam variabel yang mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, variabel pemilu yang bebas dan adil menurun paling tajam yaitu sebesar 34,49 poin, dari 100,00 pada 2018 menjadi 65,51 pada 2019. Di sisi lain, variabel yang mengalami pengingkatan paling tinggi terdapat pada variabel kebebasan berpendapat yang meningkat sebesar 17,35 poin dari 72,23 pada tahun 2018 menjadi 89,59 pada tahun 2019. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Perkembangan Indeks Variabel IDI provinsi Aceh 2018-2019

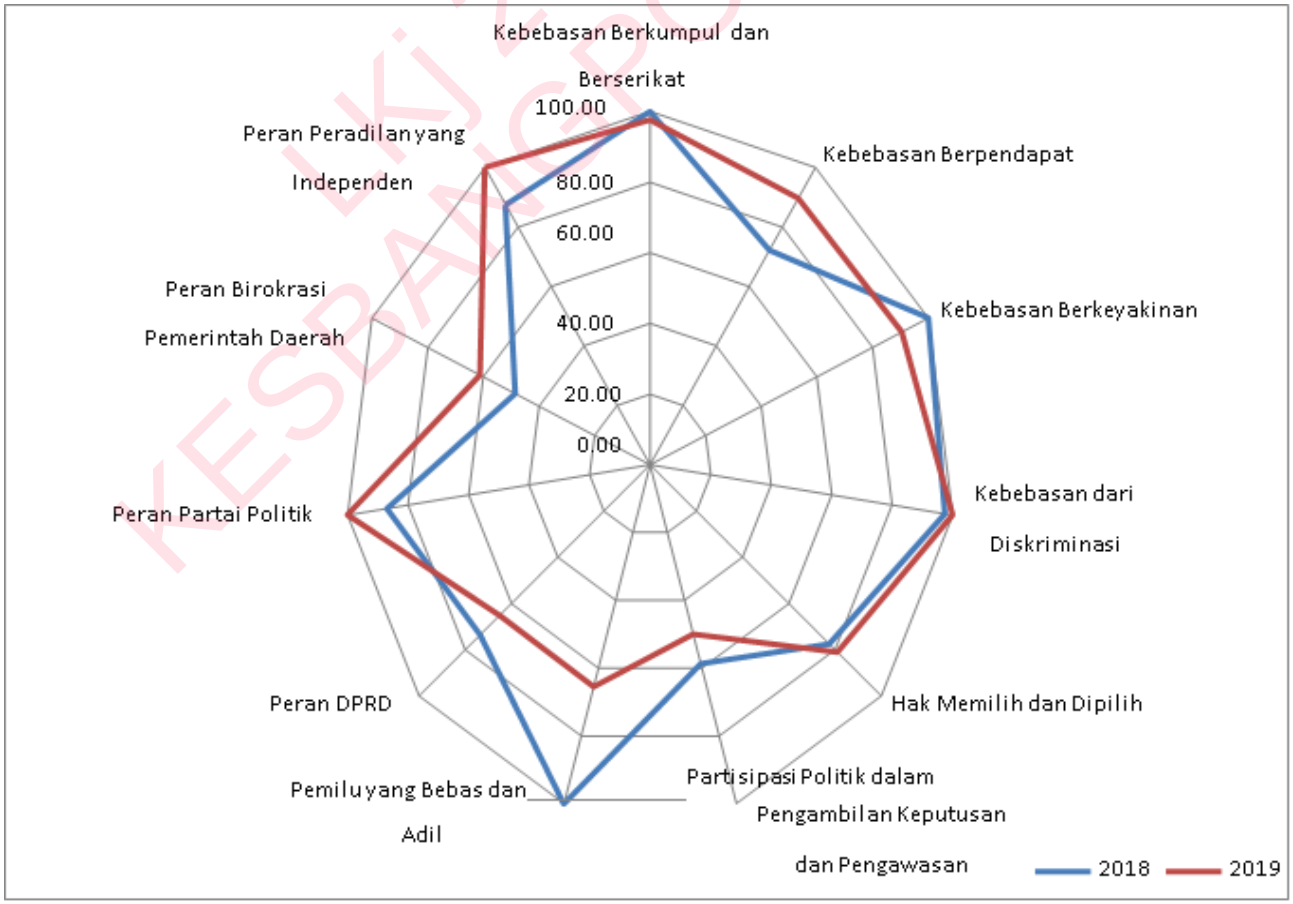

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Tabel 3.11
Daftar Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Sasaran Strategis	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Ket.
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Sosialisasi Regulasi Politik bagi Masyarakat	
	Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik	
	Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	
	Pengelolaan Database Parpol	
	Pemantauan Situasi Politik	

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4.1.8. Analisis Program kegiatan Sasaran Strategis III : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia

A. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri

a. Sosialisasi Regulasi Politik bagi Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi Regulasi Politik Bagi Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, dengan target dalam rangka kewajiban Pemerintah dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam kehidupan berpolitik serta keikutsertaannya dalam mengawal dan menentukan pembangunan yang lebih baik.

Pada Tahun Anggaran 2020 Bidang Politik Dalam Negeri merencanakan pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 220 orang, masing-masing 55 Orang per angkatan dengan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota. Namun, dengan adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sebanyak 1 Angkatan dengan jumlah peserta 55 Orang yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.

b. Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik

Kegiatan Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Dalam Berpolitik dilaksanakan dengan menggunakan metode Sosialisasi atau dialog interaktif antara Narasumber dengan para peserta kegiatan, dengan target dalam rangka pemberdayaan Partai Politik, Ormas/LSM, Aparatur Pemerintah dan Komponen Masyarakat dalam membangun etika dan budaya yang baik dalam berpolitik yang dilaksanakan di Aula Vitra Convention Hall Kota Langsa dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari pengurus partai politik, pengurus ormas/LSM, komponen masyarakat dan aparatur pemerintahan.

c. Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal

Kegiatan ini telah memperoleh hasil sesuai target dalam rangka memberdaya dan berkreasinya Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, Partai Politik Lokal, Lembaga Nirlaba lainnya serta Lembaga atau Instansi Vertikal khususnya perempuan dan kaum marginal dalam meningkatkan kecakapan dan kemampuannya serta pencapaian

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan kepengurusan Partai Politik mengharuskan untuk menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian dalam pelaksanaanya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik tidak hanya sebagai partisipan namun harus benar-benar menunjukkannya eksistensinya. Target penyelenggaraan kegiatan untuk memotivasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat dari kaum perempuan dan marginal pada daerah-daerah yang mayoritas kehidupan berpolitiknya yang masih sangat rendah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan menggunakan metode Sosialisasi atau dialog interaktif antara Narasumber dengan para peserta kegiatan. Untuk jumlah peserta 45 orang per angkatan atau jumlah seluruhnya 90 orang dengan jumlah pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 Angkatan di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

d. Pengelolaan Database Parpol

Kegiatan ini telah memperoleh hasil sesuai target dalam rangka tersedianya Database Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Aceh Tahun 2018 serta data-data dukung yang terkait sebagai bahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dalam bentuk soft dan hard copy sebagai bahan publikasi dan pelaporan, berupa:

- Pembentukan Tim Aplikasi SIMPOLDAGRI pada Badan Kesbangpol Aceh, sesuai Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Nomor 200/50.A/2020. Sesuai dengan tugasnya, tersedianya Data Informasi Perkembangan Politik terkini melalui aplikasi SIMPOLDAGRI.
- Pembentukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRK Kabupaten/Kota se-Aceh. Sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 210/908/2020. Tugas yang telah dilaksanakan Tim Pokja PAW telah menyampaikan seluruh berkas hasil berita acara atau rekomendasi untuk tindaklanjut dari usulan pengajuan PAW Anggota DPRK kepada Gubernur Aceh.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

Adapun hasil yang telah dicapai yaitu :

a. Tersedianya Data Informasi Perkembangan Politik terkini melalui aplikasi SIMPOLDAGRI;
b. Terselesaikannya 77 berkas oleh Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRK Kabupaten/Kota se-Aceh terhadap usulan pemberhentian atau Pergantian Antarwaktu dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian dari Gubernur sesuai target atau dibawah 7 hari sejak diterimanya usulan; dan
c. Terverifikasinya oleh Tim Verifikasi/Penelitian Berkas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh tahun 2018 sebanyak 12 dari 13 Partai Politik yang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana hasil Pemilhan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

e. Pemantauan Situasi Politik

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, dijelaskan bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantuan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan. secara rinci data-data dukung yang terkait sebagai bahan pada Bidang Politik Dalam Negeri, berupa :

- Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 210/922/2020. Sesuai dengan tugasnya TIM Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah telah melaksanakan Rapat secara rutin dengan agenda rapat berbagai issu-issu aktual yang terjadi di Aceh untuk menjadi bahan Laporan yang disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, laporan tersebut disampaikan secara rutin dan triwulan.

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

3.4.1.9. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

Tabel 3.12
Analisis Tingkat Efisiensi Berdasarkan Anggaran
Sasaran Strategis III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
							ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9= (7-8)	10= (5-9)
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	**Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah**	**7 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**97,84**	**B.**	**Program Pendidikan Politik Dalam Negeri**	**893.831.908**	**871.385.099**	**97,49**	**0,35**
					a.	Sosialisasi Regulasi Politik Bagi Masyarakat	80.442.086	80.100.700	**99,58**	**-1,74**
					b.	Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik	382.776.621	371.662.200	**97,10**	**0,74**
					c.	Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	105.099.098	103.166.775	**98,16**	**-0,33**
					d.	Pengelolaan Database Parpol	140.360.900	140.180.910	**99,87**	**-2,04**
					e.	Pemantauan Situasi Politik	185.153.203	176.274.514	**95,20**	**2,63**

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

BAB IV

REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN

4.1 Realisasi pendapatan

Jumlah target anggaran pendapatan dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa kantin) untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.29.000.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 18.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2019 tentang Retribusi Aceh dari kriteria objek jasa usaha retribusi pemakian kekayaan Aceh.

4.2 Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran APBA dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 17.041.457.839,- dengan capaian realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 desember 2020 Rp. 14.280.050.940,- atau 83,80 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.761.406.899,- (16,20%) dengan rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing-masing belanja sebagai berikut :

a. Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS sebanyak 54 orang yaitu sebesar Rp. 9.294.660.952,- dengan realisasi Rp. 6.857.823.337,- atau (**73,78**%) dan sisa anggaran Rp. **2.436.837.615,-** (**26,22**%).
b. Jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. **7.746.796.887,-** realisasi Rp. **7.422.227.603,-** atau (**95,81**%) dan sisa anggaran Rp. **324.569.284,-** (**4,19**%) untuk pelaksanaan realisasi keuangan atas 13 program dan 52 kegiatan sebagai berikut :

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

Tabel. 4.1
Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
		ALOKASI (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI (%)
	TOTAL	**17.041.457.839**	**14.280.050.940**	**2.761.406.899**	**83,80**
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**9.294.660.952**	**6.857.823.337**	**2.436.837.615**	**73,78**
	BELANJA LANGSUNG	**7.746.796.887**	**7.422.227.603**	**324.569.284**	**95,81**
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3.000.529.846**	**2.883.736.670**	**116.793.176**	**96,11**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	1.751.000	349.000	**83,38**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.555.040	381.407.973	91.147.067	**80,71**
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.317.367	40.686.512	630.855	**98,47**
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.127.657	84.120.750	6.907	**99,99**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.179.679	63.794.096	1.385.583	**97,87**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.224.163	1.224.064	99	**99,99**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.614.800	9.614.000	800	**99,99**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.225.000	16.225.000	0	**100,00**
	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000	14.000.000	0	**100,00**
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	470.581.400	468.266.475	2.314.925	**99,51**
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	41.400.000	39.966.000	1.434.000	**96,54**
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.782.204.740	1.762.680.800	19.523.940	**98,90**
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**331.855.974**	**317.424.254**	**14.431.720**	**95,65**
	Pembangunan gedung kantor	0	0	0	**0,00**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	163.076.028	163.076.028	0	**100,00**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.417.989	5.417.989	0	**100,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0	**0,00**
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	163.361.957	148.930.237	14.431.720	**91,17**
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	**0,00**
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**100,00**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.200.000	1.200.000	0	**100,00**

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
		ALOKASI (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI (%)
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**611.716.673**	**593.033.276**	**18.683.397**	**96,95**
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan	207.421.820	203.940.294	3.481.526	**98,32**
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	80.731.859	80.728.838	3.021	**100,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	323.562.994	308.364.144	15.198.850	**95,30**
6	**Progaram Fasilitasi Kewaspadaan Nasional**	**1.990.949.291**	**1.858.216.173**	**132.733.118**	**93,33**
	Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional	138.665.557	134.183.949	4.481.608	**96,77**
	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	72.094.750	70.296.449	1.798.301	**97,51**
	Forum Dialog di Daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional	1.742.771.533	1.616.414.924	126.356.609	**92,75**
	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	37.417.451	37.320.851	96.600	**99,74**
7	**Program Bina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan**	**84.178.202**	**81.234.704**	**2.943.498**	**96,50**
	Pemantapan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	84.178.202	81.234.704	2.943.498	**96,50**
	Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	0	0	0	**0,00**
	Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban	0	0	0	**0,00**
8	**Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pendidik	0	0	0	**0,00**
	Penyiapan Kader-kader Pembauran Kebangsaan	0	0	0	**0,00**
	Penyiapan Kader Bela Negara	0	0	0	**0,00**
9	**Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	**266.914.780**	**256.415.652**	**10.499.128**	**96,07**
	Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat	0	0	0	**0,00**
	Pengelolaan Database Ormas dan LNL	76.778.606	75.414.875	1.363.731	**98,22**
	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan LNL	98.795.822	98.062.271	733.551	**99,26**
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL	27.863.049	27.862.956	93	**100,00**
	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas/LNL	63.477.303	55.075.550	8.401.753	**86,76**

LKj 2020 KESBANGPOL ACEH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
		ALOKASI (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI (%)
10	**Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**164.993.300**	**161.690.000**	**3.303.300**	**98,00**
	Forum Pelestarian Pengembangan dan Pemantapan Seni dan Budaya	0	0	0	**0,00**
	Forum Komunikasi Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	120.593.300	117.290.000	3.303.300	**97,26**
	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	0	0	0	**0,00**
	Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	44.400.000	44.400.000	0	**100,00**
11	**Program pendidikan politik dalam negeri**	**930.656.616**	**908.157.324**	**22.499.292**	**97,58**
	Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik	18.730.022	18.702.750	27.272	**99,85**
	Sosialisasi Regulasi Politik Bagi Masyarakat	80.442.086	80.100.700	341.386	**99,58**
	Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Dalam Berpolitik	382.776.621	371.662.200	11.114.421	**97,10**
	Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	105.099.098	103.166.775	1.932.323	**98,16**
	Pendidikan Politik Bagi Pengurus Parpol	18.094.686	18.069.475	25.211	**99,86**
	Pengelolaan Database Parpol	140.360.900	140.180.910	179.990	**99,87**
	Pemantauan Situasi Politik	185.153.203	176.274.514	8.878.689	**95,20**
12	**Program Pembauran Kebangsaan**	**222.134.458**	**221.603.000**	**531.458**	**99,76**
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	97.137.550	97.137.000	550	**100,00**
	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	124.996.908	124.466.000	530.908	**99,58**
13	**Program Penanganan Konflik**	**141.667.747**	**139.516.550**	**2.151.197**	**98,48**
	Penanganan Potensi Konflik	107.110.067	106.593.800	516.267	**99,52**
	Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh	34.557.680	32.922.750	1.634.930	**95,27**
	Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh	0	0	0	**0,00**

LKI 2020 KESBANGPOL ACEH

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKJ). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJ ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dari uraian Laporan Kinerja (LKJ)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2020 Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja dikarenakan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun tiap tahunnya tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai yang masuk;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;
4. Arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

5.2 Tindak lanjut

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol Aceh dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Aceh;

1. Peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan jabatan dan beban kerja.
2. Pendataan jumlah pegawai dengan beban kerja dan melakukan permintaan pegawai ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama Sarana dan prasarana administrasi kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
4. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak. Walaupun masih sangat sederhana, kami berharap LKJ ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2020.

Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LKJ di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Februari 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19691120 199103 1 014

LKJ 2020 KESBANGPOL ACEH

LKj 2020
KESBANGPOL ACEH

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh
Jl. Tgk. MALEM No: 8 KUTA ALAM BANDA ACEH
Telp. 0651 - 21941, 33194, Fax . 0651 - 31858
kesbangpolinmas@acehprov.go.id